

**UPAYA SASTRAWAN LAMPUNG DALAM PENGEMBANGAN  
DEMOKRASI LOKAL DENGAN PRINSIP PIIL PESENGGIRI  
(Studi pada Pengurus Dewan Kesenian Lampung Periode 2015-2019)**

**Oleh**

**Rizky Satria**



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
BANDAR LAMPUNG  
2016**

## ABSTRACT

Efforts Sastrawan Lampung in the Development of Local Democracy  
(Studies in Letters Governing Council Lampung Keseninan Period 2015-2019)

By

RizkySatria

Democracy is revealed by Western scientists are universal values that have the ideal conception and especially be difficult for Indonesia Lampung. Besides the introduction of the concept of democracy is a variation understanding of disability in the ongoing democratic process in a democratic fashion. Broadly speaking, to be maintained the basic concept of democracy requires merging with local Parochial cultural values, due to the countries in transition such as Indonesia, the incorporation of the concept of democracy with the local culture is indispensable as part of the preservation and facilitate the development of democracy it self. The process of merging with the local culture of democratic values in the form of local democracy is more easily accomplished because the local culture is more rooted. Poets is one "responsible" for implementing local democracy in their respective regions, as officials of a literary organization in Lampung Arts Council has the

task of implementing a minimum of local democracy in the organizations of the ministry it self. This study aims to determine the organizational process implemented by writers who take charge of the ministry in the development of local democracy. To achieve this goal combined local cultural values that democratic decision-making process within the ministry and other organizational mechanisms.

While the methods used is a qualitative method that produces descriptive data with the sampling techniques which refer to nonprobability sampling is purposive sampling. From the results of this study found that writers DKL, organisationally in developing local democracy are not fully aware of the situation. Poets DKL act in making organizational decisions, making the program work, relationships with other administrators and other artists, are not aware of the importance of the development of local democracy.

The development of local democracy do literati board DKL happen by accident. But personally, Lampung literary incorporated in the ministry has been making efforts to produce works and programs that have a value of local democracy. The process of developing local democracy by writers who refer to the local domokrasi Lampung PiilPesenggiri. Pesenggiri, NemuiNyimah, NengahNyappur and Sakai Sambayan found on virtually every organizational process but still too superficial. This is due to the implementation of democratic development loakal intentional and conscious. DKL writers for it should focus on developing local democracy through the organizational mechanism that is being executed.

## **ABSTRAK**

### **UPAYA SASTRAWAN LAMPUNG DALAM PENGEMBANGAN DEMOKRASI LOKAL DENGAN PRINSIP PIIL PESENGGIRI (Studi pada Pengurus Dewan Kesenian Lampung Periode 2015-2019)**

Oleh

Rizky Satria

Demokrasi yang dipeberkan oleh ilmuwan Barat adalah nilai universal yang memiliki konsepsi ideal dan sulit diterima bagi Indonesia khususnya Lampung. Selain itu pengenalan konsep demokrasi mengalami variasi pemahaman yang berakibat tidak berlangsungnya proses demokrasi secara demokratik. Secara garis besar untuk dapat dipertahankan konsep dasar demokrasi memerlukan penggabungan dengan nilai budaya lokal yang Parochial, karena untuk negara yang sedang mengalami transisi seperti Indonesia, penggabungan konsep demokrasi dengan budaya lokal sangat diperlukan sebagai bagian dari pelestarian dan memudahkan pembinaan demokrasi itu sendiri. Proses penggabungan nilai demokrasi dengan budaya lokal dalam bentuk demokrasi lokal lebih mudah terlaksana karena budaya lokal lebih mengakar. Sastrwan merupakan salah satu “penanggungjawab” untuk mengimplementasikan demokrasi lokal di daerahnya masing-masing, sebagai pengurus sebuah organisasi sastrawan di Dewan Kesenian Lampung memiliki tugas pelaksana demokrasi lokal minimal dalam organisasi DKL itu sendiri.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui proses keorganisasian yang dilaksanakan oleh sastrawan yang menjadi pengurus DKL dalam rangka pengembangan demokrasi lokal. Untuk mencapai tujuan ini dipadukanlah nilai budaya lokal yang demokratis dengan proses pengambilan keputusan dalam DKL dan mekanisme organisasi lainnya. Sedangkan metode yang digunakan adalah metode kualitatif yang menghasilkan data secara deskriptif dengan tehnik sampling yang mengacu pada nonprobability sampling yaitu purposive sampling.

Dari hasil penelitian ini ditemukan bahwa sastrawan DKL, secara keorganisasian dalam mengembangkan demokrasi lokal tidak sepenuhnya menyadari keadaan tersebut. Sastrawan DKL bertindak dalam pengambilan keputusan organisasi, pembuatan program kerja, hubungan dengan sesama pengurus dan seniman lainnya, tidak menyadari akan pentingnya pengembangan demokrasi lokal. Pengembangan demokrasi lokal yang dilakukan sastrawan pengurus DKL terjadi secara tidak sengaja. Namun secara pribadi, sastrawan Lampung yang tergabung dalam DKL telah melakukan upaya dengan menghasilkan karya dan program yang memiliki nilai demokrasi lokal.

Proses pengembangan demokrasi lokal oleh sastrawan yang mengacu pada demokrasi lokal Lampung Piil Pesenggiri yaitu Pesenggiri, Nemui Nyimah, Nengah Nyappur dan Sakai Sambayan ditemukan pada hampir setiap proses keorganisasian namun masih terlalu dangkal. Hal ini disebabkan tidak terselenggaranya pembinaan demokrasi lokal secara disengaja dan disadari. Untuk itu sebaiknya sastrawan DKL lebih memikirkan pengembangan demokrasi lokal melalui mekanisme organisasi yang sedang dijalankan.

**UPAYA SASTRAWAN LAMPUNG DALAM PENGEMBANGAN  
DEMOKRASI LOKAL DENGAN PRINSIP PIIL PESENGGIRI  
(Studi Pada Pengurus Dewan Kesenian Lampung Periode 2015-2019)**

**Oleh :  
Rizky Satria**

**Skripsi  
Sebagai Salah Satu Syarat untuk Mencapai Gelar  
SARJANA ILMU PEMERINTAHAN  
Pada  
Jurusan Ilmu Pemerintahan  
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  
Universitas Lampung**



**JURUSAN ILMU PEMERINTAHAN  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
2016**

Judul Skripsi

: **UPAYA SASTRAWAN LAMPUNG DALAM  
PENGEMBANGAN DEMOKRASI LOKAL DENGAN  
PRINSIP PIIL PESENGGIRI**  
(Studi pada Pengurus Dewan Kesenian Lampung  
Periode 2015-2019)

Nama Mahasiswa

: **Rizky Satria**

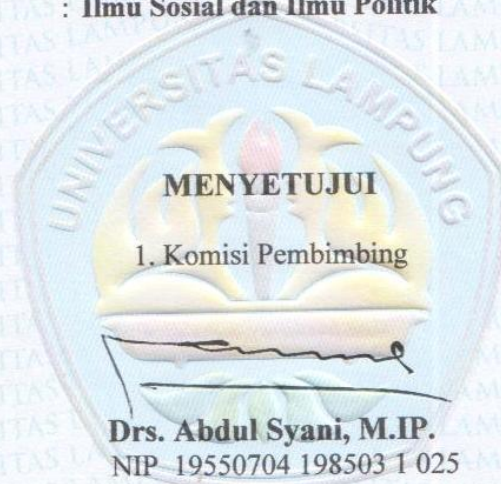
No. Pokok Mahasiswa : **1216021101**

Jurusan

: **Ilmu Pemerintahan**

Fakultas

: **Ilmu Sosial dan Ilmu Politik**



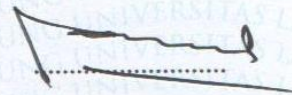
2. Ketua Jurusan Ilmu Pemerintahan

**Drs. Denden Kurnia Drajat, M.Si.**  
NIP 19600729 199010 1 001

## MENGESAHKAN

### 1. Tim Penguji

Ketua : **Drs. Abdul Syani, M.IP.**



Penguji : **Dr. Suwondo, M.A.**



### 2. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

**Drs. H. Agus Hadiawan, M.Si.**

NIP 19580109 198603 1 002



Tanggal Lulus Ujian : **07 Juni 2016**

## PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa:

1. Karya tulis saya, Skripsi ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (Sarjana), baik di Universitas Lampung maupun di perguruan tinggi lain.
2. Karya tulis ini murni gagasan, rumusan dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan Tim Pembimbing dan Penguji.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan tidak benar dalam pernyataan ini saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya tulis ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di Universitas Lampung.

Bandar Lampung, 15 Juni 2016



**Rizky Satria**  
**NPM. 1216021101**

## **RIWAYAT HIDUP**



Penulis dilahirkan di Bandar Lampung pada tanggal 22 Juli 1993. Penulis merupakan anak ketiga dari pasangan Bapak Safe'i dan Ibu Erna Tiara.

Pendidikan formal Penulis diawali dari Sekolah Dasar Al Kautsar Bandar Lampung pada tahun (2000-2006).

Penulis melanjutkan ke Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama Al Kautsar Bandar Lampung pada tahun (2006-2009). Pada Tahun 2012 Penulis lulus dari Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Bandar Lampung, dan pada tahun yang sama Penulis diterima sebagai mahasiswa di Fakultas Fisip Jurusan Ilmu Pemerintahan Strata 1 (S1) Reguler Universitas Lampung melalui jalur SBMPTN.

# MOTTO

“Apa yang saya inginkan dan cita-citakan pasti akan tercapai dengan ridho orang tua, kerja keras, dan doa. Apabila tidak tercapai yakinlah bahwa allah swt memiliki rencana yang lebih indah dari itu”

“Kejujuran adalah dasar yang paling penting untuk sukses. Tanpa kejujuran takkan ada keyakinan dan kemampuan untuk bertindak. (Mary Kay Ash)”

“Tanpa impian kita tak akan meraih apapun, tanpa cinta kita tak akan bisa merasakan apapun dan tanpa allah kita buka siapa-siapa”

## PERSEMBAHAN

Bismillah hirahmannirahim ya allah engkau dzat yang menciptakan alam jagat raya dan yang menguasai seluruh jiwa manusia, dengan izin ridho-mu aku dapat menyelesaikan skripsi ini.dengan segenap ketulusan dan kerendahan hati ku persembahkan karya ku ini kepada:

Ayahku Safei dan ibukuErna Tiara yang senantiasaberdoadan  
berusahakerasdalamsegalaketerbatasanuntuk  
menjadikanPenulissebagaiseoranganak yangberpendidikan.Semoga  
ilmuyangdidapatkan bisamenjadi bekal untuk membahagiakan Ayahanda  
danIbunda.

.

Kakak-Adikku ImanSaputra SH, Rima KaruniaS.Pd. dan MuhamadIlhamyang  
selalu memberikan keceriaan dan kasih sayang.

Keluarga besarku tercinta

Serta almamaterku yang kubanggakan

## SANWACANA

Segala puji hanyalah bagi Allah SWT atas nikmat dan karunia-Nya, sehingga Penulis dapat menyusun skripsi yang berjudul **“Upaya Sastrawan Lampung Dalam Pengembangan Demokrasi Lokal Dengan Prinsip Piil Pesenggiri (Studi Pada Pengurus dewan Kesenian Lampung Periode 2015-2019)”** sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Ilmu Pemerintahan. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna., sebagai akibat dari keterbatasan yang ada pada diri penulis.

Pada kesempatan ini, penulis sampaikan ucapan terimakasih kepada pihak-pihak yang telah banyak membantu dalam penyusunan skripsi ini antara lain, yaitu:

1. Bapak Drs. Agus Hadiawan, M.Si. selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung
2. Bapak Drs. Denden Kurnia Drajat, M. Si. selaku Ketua Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung.
3. Bapak Drs Abdul Syani, M.I.P. selaku Pembimbing Utama Skripsi, yang telah banyak memberikan masukan, kritik-saran dan memotivasi serta seringkali mengajak berdiskusi untuk membuka pikiran penulis dan menggali potensi penulis lebih dalam lagi, sehingga dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini.

4. Bapak Dr. Suwondo, MA. selaku pembahas dan penguji yang telah memberikan kritik dan saran kepada Penulis dalam penyusunan skripsi ini.
5. Bapak MAULANA MUKHLIS, S.SOS., M.IP selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah menjadi orang tua Penulis, selama Penulis menempuh studi di Jurusan Ilmu Pemerintahan. Terimakasih banyak untuk semua kata-kata khidmat yang membuat Penulis berusaha untuk menjadi pribadi yang lebih baik.
6. Seluruh Dosen Ilmu Pemerintahan FISIP Unila, terimakasih atas ilmu yang telah diberikan kepada penulis selama menuntut ilmu di Jurusan Ilmu Pemerintahan.
7. Staf Akademik, Staf Kemahasiswaan yang telah membantu kelancaran administrasi, yang telah banyak sekali membantu dan mempermudah proses administrasi dari awal perkuliahan hingga akhir perkuliahan.
8. Kedua orang tuaku, Ayahandaku Safe'i dan Ibundaku Erna Tiara yang senantiasa berdoa dan berusaha keras dalam segala keterbatasan untuk menjadikan Penulis sebagai seorang anak yang berpendidikan. Semoga ilmu yang didapatkan bisa menjadi bekal untuk membahagiakan Ayahanda dan Ibunda.
9. kakak-adikku, Iman Saputra SH, Rima Karunia S.Pd dan Muhamad Ilham Terimakasih untuk keceriaan yang kalian ciptakan ketika sedang mengalami kelelahan dan kepenatan. Semoga kalian bias selalu menemani dikala Senag Maupun Susah.

10. Terimakasih Kepada kekasihku Aprilia Maharani yang selalu menemani disaat susah maupun bahagia yang selalu memberi semangat disaat penulis mulai merasa penat.
11. Sahabat-sahabatku: Rizky Pranata, Ignasius Fanmico, Juni Renaldu, Dwi Dian Kusuma, Evan Sarli, Yoga Swasono, Bagas Aji Satrio, Teky Prayuda, Armindo, Wardana, Lutfi Imam Mutaqin, Muamar Maldi, Rendi Noverdi, yang telah memberikan dukungan, canda tawa serta banyak cerita selama berjuang bersama di Jurusan Ilmu Pemerintahan.
12. Sahabat dan teman bertukar pikiran, Rizky Pranata dan Ananda Putri Sujatmiko, yang telah banyak memberikan motivasi, dukungan, kritik-saran untuk kebaikan bersama. Terimakasih banyak telah banyak membantu dalam pelaksanaan Seminar Usul dan Hasil Penelitian..
13. Seluruh teman-teman Jurusan Ilmu Pemerintahan 2012.

Terimakasih banyak untuk semua diskusi berkualitas serta bantuan dan dukungan selama ini. Semoga Allah SWT membalas amal baik kita semua dan semoga skripsi ini dapat bermanfaat.

Bandar Lampung, 15 Juni 2016

Rizky Satria

## DAFTAR ISI

### Halaman

|                                                                    |        |
|--------------------------------------------------------------------|--------|
| DAFTAR TABEL .....                                                 | iii    |
| DAFTAR GAMBAR .....                                                | vi     |
| <br>I.PENDAHULUAN .....                                            | <br>1  |
| A.Latar Belakang Masalah.....                                      | 1      |
| B.Rumusan Masalah .....                                            | 15     |
| C.Tujuan Penelitian.....                                           | 15     |
| D.Kegunaan Penelitian.....                                         | 15     |
| <br>II.TINJAUAN PUSTAKA.....                                       | <br>16 |
| A.Konsep Demokrasi .....                                           | 16     |
| 1. Konsep Dasar Demokrasi.....                                     | 16     |
| 2. Upaya Pengembangan Demokrasi .....                              | 20     |
| 3. Organisasi Pembina Demokrasi .....                              | 25     |
| B. Demokrasi Lokal .....                                           | 28     |
| C. Demokrasi Dalam Budaya Lampung .....                            | 31     |
| D. Penyebab dan Tujuan Demokrasi Lokal .....                       | 35     |
| E. Sastra dalam Demokrasi .....                                    | 36     |
| F. Sastrawan Penyampai Ide .....                                   | 39     |
| G. Peran DKL dalam Pembinaan Sastra .....                          | 40     |
| H. Upaya Sastrawan Lampung dalam Pengembangan Demokrasi Lokal..... | 44     |
| I. Kerangka Fikir .....                                            | 47     |

|                                                                                         |    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|----|
| III. METODE PENELITIAN.....                                                             | 50 |
| A. Tipe Penelitian.....                                                                 | 50 |
| B. Fokus Penelitian .....                                                               | 51 |
| C. Lokasi Penelitian .....                                                              | 52 |
| D. Jenis Data .....                                                                     | 52 |
| E. Teknik Penentuan Informan .....                                                      | 53 |
| F. Teknik Pengumpulan Data.....                                                         | 54 |
| G. Teknik Pengolahan Data .....                                                         | 55 |
| H. Pengecekan Kebenaran Data .....                                                      | 56 |
| I. Teknik Analisis dan Pengolahan Data .....                                            | 56 |
| IV. GAMBARAN UMUM .....                                                                 | 59 |
| A. Gambaran Umum Obyek Penelitian .....                                                 | 59 |
| 1. Sejarah Terbentuknya Dan Perkembangan Dewan Kesenian Lampung.....                    | 59 |
| 2. Tujuan Dibentuknya DKL.....                                                          | 65 |
| 3. Tujuan Program Kerja DKL.....                                                        | 66 |
| B. Gambaran Umum Informan .....                                                         | 69 |
| 1. Usia Informan.....                                                                   | 69 |
| 2. Latar Belakang Pekerjaan Informan.....                                               | 70 |
| 3. Tingkat Pendidikan Informan.....                                                     | 71 |
| V. HASIL DAN PEMBAHASAN.....                                                            | 72 |
| A. Penerapan Demokrasi Lokal oleh Sastrawan Lampung Dalam Struktur Organisasi DKL ..... | 72 |
| 1. Struktur Organisasi dan metode pergantian pengurus DKL .....                         | 72 |
| 2. Mekanisme Organisasi .....                                                           | 75 |
| a. Netral Atau Condong Pemerintah .....                                                 | 75 |
| b. Hak Menjadi Pengurus .....                                                           | 77 |
| c. Struktur Organisasi .....                                                            | 79 |
| 3. Metode Pengambilan Keputusan.....                                                    | 82 |
| 4. Program Kerja .....                                                                  | 84 |
| a. Penyusunan Program Kerja.....                                                        | 84 |

|                                                                                                                                                                                  |     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| b. Pelaksanaan Program Dan Kepanitian.....                                                                                                                                       | 85  |
| c. Evaluasi Pelaksanaan Program .....                                                                                                                                            | 87  |
| B. Upaya Sastrawan Dalam Pengembangan Demokrasi Lokal .....                                                                                                                      | 88  |
| 1. Demokrasi Budaya Piil Pesenggiri Dalam Organisasi DKL. ....                                                                                                                   | 88  |
| 2. Upaya Personal PengenmbanganDemokrasi Lokal oleh<br>sastrawan DKL.....                                                                                                        | 94  |
| C. Upaya Penerapan Demokrasi Lokal Dalam Struktur Organisasi DKL Dan<br>Upaya Pengembangan Demokrasi Lokal Oleh Sastrwan Pengurus Dewan<br>Kesenian Lampung Secara Personal..... | 98  |
| VI. SIMPULAN DAN SARAN.....                                                                                                                                                      | 102 |
| A. Simpulan                                                                                                                                                                      | 102 |
| B. Saran .....                                                                                                                                                                   | 103 |

#### DAFTAR PUSTAKA

#### LAMPIRAN

## DAFTAR TABEL

| Tabel                                                                             | Halaman |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------|
| 1. Kisi Kisi Wawancara.....                                                       | 58      |
| 2. Program Kerja DKL Tahun 2015.....                                              | 67      |
| 3. Program Kerja DKL Tahun 2016.....                                              | 68      |
| 4.komposisi Usia Informan Ketika Masuk Menjadi Pengurus DKL Hingga Saat ini ..... | 69      |
| 5. Komposisi Pekerjaan Informan.....                                              | 70      |
| 6.Tingkat Pendidikan Informan .....                                               | 71      |
| 7. Tahapan Pengambilan Keputusan DKL Periode 2015-2019.....                       | 82      |

## DAFTAR GAMBAR

| Gambar                             | Halaman |
|------------------------------------|---------|
| 1. Kerangka Pikir Penelitian ..... | 49      |

## I. PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Demokrasi merupakan bagian dari pemikiran yang memberikan kesempatan untuk individu dalam sebuah kelompok terlibat dalam proses-proses di dalamnya secara rasional. Mengutip Dhal (1985), bahwa ide dasar demokrasi berasal dari teori-teori rasionalitas yang didasarkan pada *universalitas* hukum alam yang menjelaskan tentang kedaulatan masyarakat sebagai individu-individu dan makhluk sosial, hingga nilai tersebut terus berkembang seiring dengan pergerakan dan pergeseran pada dinamika sosial.

Pentingnya demokrasi dikembangkan dalam sebuah sistem kenegaraan karena demokrasi mensyaratkan adanya prinsip keadilan yang menyeluruh. Efek lainnya adalah adanya penghargaan pada setiap individu dan diberikan kebebasan dalam berbagai tindakan yang tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku. Mayo (1982:165-186), memberikan secara rinci nilai-nilai khusus demokrasi sebagai penjelasan yang sederhana yaitu: menyelesaikan pertikaian secara damai dan sukarela, menjamin terjadinya perubahan secara

damai, pergantian penguasa dengan teratur, penggunaan paksaan seminimal mungkin, keanekaragaman, menegakan keadilan dan kebebasan.

Demokrasi pun secara jelas mensyaratkan adanya partisipasi setiap individu untuk menyampaikan pendapatnya. Partisipasi ini diharapkan efektif terutama dalam pengambilan keputusan kolektif. Misalnya dalam sebuah negara, setiap warga negaranya harus memiliki kesempatan yang sama dan memadai untuk menyatakan hak-hak istimewanya dalam rangka mewujudkan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia sebagaimana telah tertuang dalam UUD 1945 yang salah satu isinya berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab, ini sangat cocok dengan *culture* bangsa Indonesia yang menyelesaikan masalah dengan musyawarah untuk mencapai mufakat.

Perkembangan demokrasi di Indonesia juga mengalami berbagai periode penting. Indonesia dalam perkembangan politik mengenal istilah demokrasi terpimpin dan demokrasi yang berlandaskan Pancasila (Demokrasi Pancasila). Demokrasi yang terakhir disebutkan ini merupakan ide pemerintah orde baru dan terbukti berjalan timpang, karena demokrasi memiliki kendali. Terbukanya demokrasi yang bersamaan dengan momentum reformasi diyakini mampu memberikan sumbangan positif untuk terlaksananya idealis demokrasi. Namun yang terjadi kemudian jauh dari harapan. Pelaksanaan demokrasi mengalami stagnasi dan diluar kendali hukum.

Pandangan ini dikuatkan oleh Madjid (Taher,1994:132), bahwa orang akan menyadari akan adanya tarik menarik antar satu pihak, pengertian demokrasi sebagai suatu yang universal dan pihak lain, perwujudan demokrasi itu dalam konteks ruang, seperti faktor geografis yang seringkali berdampak kultural, dan konteks waktu seperti pengalaman sejarah suatu bangsa yang menjadi unsur kuat identifikasi dari bangsa itu, maka dapat dipati bahwa demokrasi tidak pernah sederhana.

Penyalahgunaan demokrasi sejak era reformasi ini dicatat oleh Rendra (2001:62-63) bahwa gerakan reformasi seakan terhambat ketika etika politik sudah tidak dipedulikan lagi. Berbagai persoalan muncul, terutama sikap mau menang sendiri. Hal ini menghambat pelaksanaan demokrasi dan menyumbang terbengkalainya usaha demokratisasi yang didengungkan banyak kalangan.

Demokrasi sebagaimana yang dijelaskan diatas, merupakan demokrasi ideal dan belum dapat terwujud dengan baik. Beragam kelompok yang memedomi demokrasi ideal tersebut akan menemui jalan sulit dalam pelaksanaannya. Selain berbenturan dengan konsep yang bermakna ganda, kelompok tersebut juga disibukan dengan masalah konsepsi yang sedang diterapkan. Artinya konsep demokrasi yang dibawa pemikir dari barat maupun pemikir dari Indonesia sendiri ternyata sangat ideal namun belum siap diterapkan di Indonesia. Proses Demokratisasi perlu kiranya dilihat sebagai usaha dalam

memuliakan manusia atau rakyat. Munculnya tendensi tirani mayoritas (Suku, Ras, maupun Agama) harus dicegah, karena tirani dalam bentuk demikian sama saja berbahayanya untuk kemanusiaan dan kebudayaan dengan tirani minoritas.

Menurut Estan (1999:5–6), pembentukan budaya Indonesia berlangsung tidak melalui proses yang sentralistik. Beberapa sentra kantong–kantong kebudayaan haruslah ditumbuhkan dan dikembangkan guna memungkinkan nilai–nilai budaya etnis dapat digunakan dan ditemukan titik singgungnya dengan nilai–nilai budaya global. Nilai budaya global yang demikian akan membentuk sistem budaya dalam menghadapi tantangan kebudayaan dimasa depan. Pada satu pihak nilai budaya merupakan identitas satu yang lebih berakar di dalam masyarakat dan pihak lain nilai tersebut menjadi universal, sehingga mampu menjawab tantangan globalisasi dan universalitas.

Menurut Mayo (Budiardjo:1980),ada sejumlah nilai operasional yang menjadi landasan pelaksanaan demokrasi,yaitu sebagai berikut:

- a. Menyelesaikan perselisihan secara damai dan melembaga. Dalam kehidupan masyarakat wajar jika terdapat perselisihan pendapat dan kepentingan yang penting bahwa dalam alam demokrasi perselisihan–perselisihan itu harus di selesaikan melalui perundingan serta dialog terbuka agar tercapai kompromi,konsensus atau mufakat;

- b. Terselenggaranya perubahan masyarakat secara damai. Kehidupan masyarakat selalu berubah oleh karena itu, pemerintah harus dapat menyesuaikan kebijakan publiknya dengan perubahan-perubahan itu. Pemerintah juga perlu menjaga agar perubahan-perubahan dalam masyarakat tetap terkendali;
- c. Menyelenggarakan pergantian pimpinan secara teratur. cara-cara pergantian pimpinan memalalui kekerasan, penunjukan diri sendiri atau pewarisan tidak sesuai dengan demokrasi;
- d. Membatasi penggunaan kekerasan seminimal mungkin. Demokrasi mengutamakan konsensus atau mufakat dalam menyelesaikan perbedaan kepentingan warga negara. Oleh karena itu, penggunaan kekerasan sejauh mungkin harus dihindarkan;
- e. Mengakui dan menganggap wajar adanya keanekaragaman dalam masyarakat yang tercermin dalam keanekaragaman pendapat, keanekaragaman kepentingan dan tingkah laku. Walaupun demikian, keanekaragaman itu perlu dijaga agar tidak melampaui batas karena demokrasi juga memerlukan kesatuan dan integrasi;
- f. Menjamin tegaknya keadilan. Keadilan menjadi penting dalam demokrasi karena adanya mayoritas dan minoritas dalam pengambilan keputusan secara demokrasi. Hubungan antar mayoritas dan minoritas harus dijaga sedemikian rupa agar demokrasi tidak berubah menjadi tirani mayoritas.

Nilai-nilai itulah yang dijadikan pedoman bertindak baik oleh para pejabat pemerintah dan lembaga negara, maupun juga seluruh warga negara yang bersangkutan. Dengan demikian, akan terwujud budaya demokratis dalam kehidupan masyarakat negara yang bersangkutan.

Lampung sebagai wilayah lintas budaya menjelaskan bahwa budaya lokal justru yang paling dominan dalam konteks perubahan saat ini, sebagaimana yang diungkapkan Jausal dan Asmuni dalam *Komunitas Gelembung Sabun* (2002). Kontektualisasi perubahan dalam segala bidang disini terjadi seiring makin terbukannya kran demokrasi, dalam perkembangannya sebagaimana disinyalir dalam *Komunitas Gelembung Sabun* (2002) banyak sekali kegiatan demokrasi yang tidak perlu, karena budaya politik instan. Dalam perkara ini demokrasi kadangkala menjadi tidak terkendali, demokrasi dianggap sebagai cara yang digunakan untuk bertindak semaunya dan menjadi argumentasi dalam perilaku yang tidak demokratis.

Di Lampung sendiri sebagai pengamalan makna demokrasi mulai dipertanyakan ketika terjadi gerakan mahasiswa secara besar-besaran pada bulan Mei 1998. Setidaknya dengan jatuhnya Orde Baru demokrasi menjadi terkenal yang kemudian berimbas pada gugupnya hampir semua orang terhadap apa yang disebut dengan demokrasi. Klaim demokrasi menjadi polemik yang terus menggejala dan belum menemukan jalan terbaik.

Belakangan demokrasi digunakan untuk ambisi sekelompok orang yang ingin mencapai atau mendapatkan kekuasaan. Misalnya dalam pemilihan Gubernur atau pemilihan Bupati/Walikota, demokrasi di lambangkan dengan kekerasan atau pengerahan massa untuk menekan pihak lain. Memang sikap demikian adalah bagian dari demokrasi, yakni menyampaikan pendapat, namun penyampain pendapat tersebut seringkali dengan mengorbankan orang lain agar tidak bertindak demokratis.

Demokrasi lokal khususnya di Lampung seharusnya lebih mengedepankan rasa kebersamaan dan keseragaman dibidang agama, ras, ekonomi, sosial dan budaya dikarenakan masyarakat Lampung memegang erat prinsip Piil Pesenggiri sebagaimana Piil Pesenggiri itu mengandung arti rasa dan pendirian yang dipertahankan dan dalam menyelesaikan masalah mengedepankan musyawarah untuk mencapai mufakat.

Dampak nyata demokrasi bagi kehidupan masyarakat Lampung menjadikan masyarakat Lampung dapat hidup berdampingan dalam kehidupan sehari-hari dalam bidang ekonomi, sosial dan budaya, meskipun mengetahui keanekaragaman masyarakat yang hidup di Lampung, masyarakat masih dapat hidup akur dan damai ini dikarenakan masyarakat asli Lampung memegang prinsip hidup Piil Pesenggiri, berikut beberapa unsur hidup piil Pesenggiri yang dijadikan pedoman hidup masyarakat lampung yaitu: Juluk Adek, Nemui Nyimah, Nengah Nyappur, Sakai Sambayan.

Sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, karena perbedaan pandangan mengenai demokrasi tidak dapat ditegakkannya keadilan sebagaimana prinsip demokrasi. dan tingginya tingkat penyelewengan di Lampung yang akhirnya membuat usaha demokrasi di Provinsi ini menjadi Stagnan tidak berkembang dan terkungkung oleh beberapa sebab.

Beberapa contoh penyelewengan demokrasi yg terjadi di Lampung sebagai mana yang dikutip dari sumber media massa online Detik.Com yang diakses tanggal 20 Februari 2016, Pukul 19:42 WIB) sebagai berikut:

“Jakarta-Setali tiga uang nasib dua mantan bupati yang bertetangga, Lampung Timur dan Lampung Tengah. Jika mantan Bupati Lampung Timur Satono dihukum 15 tahun penjara, maka mantan Bupati Lampung Tengah, Andi Achmad Sampurna Jaya juga dihukum dengan hukuman 3 tahun lebih ringan yaitu 12 tahun penjara."Kasus Andi Achmad Sampurna Jaya mirip dengan mantan Bupati Lampung Timur, Satono, bedanya kalau Satono pidananya 15 tahun," ujar Kepala Biro Hukum dan Humas, Ridwan Mansur dalam jumpa pers di gedung Mahkamah Agung (MA) Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta,.Bedanya, jika Satono korupsi APBD sebesar Rp 119 miliar sedangkan Sampurna Jaya korupsi Rp 28 miliar. Meski korupsinya beda jauh, tetapi hukumannya beda tipis, yaitu 3 tahun saja."Kerugian negara di Lampung Tengah sebanyak Ro 28 miliar, sedangkan di perkara Lampung Timur Rp 120 miliar dan sudah dinikmati oleh terdakwa sebanyak Rp 22,5 miliar. Antara lain itu yang menjadi dasar pertimbangan hakim memutus," papar Ridwan.Hukuman 12 tahun untuk Sampurna Jaya dijatuhkan oleh majelis hakim agung yang terdiri dari Djoko Sarwoko, Krisna Harahap, Komariah Sapardjaja, MS Lumme dan Leopold Hutagalung. Selain itu, bupati periode 2005-2010 juga didenda Rp 500 juta. Jika tidak membayar maka harus diganti dengan hukuman penjara selama 6 bulan. Andi Achmad Sampurna Jaya sebelumnya dibebaskan oleh PN Tanjung Karang pada 19 Oktober 2011. Andi Achmad Sampurna Jaya tidak ditahan oleh jaksa dalam perkara ini.”

Secara garis besar, untuk dapat dipertahankan, konsep dasar demokrasi memerlukan penggabungan dengan nilai budaya lokal yang *Parochial* sebagaimana yang dimaksud oleh Pye (Sudarsono,1982:211). Untuk negara yang sedang mengalami transisi seperti Indonesia, penggabungan konsep demokrasi dengan budaya lokal sangat diperlukan sebagai bagian dari pelestarian dan untuk memudahkan pembinaan demokrasi.

Menguatkan pendapat diatas, untuk Lampung sendiri ternyata nilai budaya lokal juga banyak yang merupakan bagian dari kriteria demokrasi Barat. Dalam buku *Sejarah Daerah Lampung* yang diterbitkan Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan, Kantor Wilayah Propinsi Lampung (114-115), dijelaskan mengenai Demokrasi lokal di daerah ini (Lampung) sebagai berikut:

“Sistem kebuayan yang juga disebut sistem marga itu merupakan sitem pemerintahan kampung yang sudah berkembang sejak lama, terutama di daerah utara yang mempunyai kebuayan, sistem ini menitik beratkan pada musyawarah dan mufakat dengan desentralisasi otonomi dalam pelaksanaanya.”

Walaupun penduduk Lampung secara etnis tidak seragam, bahkan dapat dikatakan sebagai Indonesia mini, namun menurut Anshory Jausal, justru perbedaan tersebut membuat masyarakat Lampung saling menghargai, secara etnisitas, Suku Lampung yang mendiami wilayah Lampung hanya 25% dari penduduk Lampung. Sedangkan etnis terbanyak adalah etnis Jawa 61,9% dan sisa nya etnis lain nya, Sumber Kompas Cybermedia.

Penyebaran masyarakat Lampung dan masyarakat pendatang di Lampung sebagaimana yang dikutip dari sumber media massa online Kompas Cybermedia, (yang diakses tanggal 20 Februari 2016, Pukul 19:42 WIB) sebagai berikut :

“Warga asli Lampung tersebar di Kalianda, Liwa, Kotabumi, Kotaagung, Way Kanan, Menggala, Sukadan, Abung dan jabung. Etnis lokal ini juga membangun permukiman di Bahuga, Sungkai, Terbanggi Besar, Gunung Sugih, Belambangan Pagar, dan Bandar Lampung. Sementara penduduk trans Bali banyak bermukim di Seputih Surabaya, Seputih Mataram, Seputih Banyak, Seputih Raman dan juga di Pesisir krui. Mereka membangun perkampungan dengan arsitektur rumah dan pekarangannya tidak meninggalkan ciri khas kedaerahan asal nya. Pendatang mayoritas yakni penduduk Jawa, menyebar merata diseluruh pelosok dan tempat di Lampung, yang secara administratif kini sudah terbagi menjadi 10 kabupaten dan kota, suku jawa mudah dikenal dari tipe rumah, nama desa atau kecamatannya seperti, kalirejo, Pringsewu, Sidodadi, Sukoharjo, Bangunrejo, Purworejo, Sidomulyo, Metro dan Wates, adalah contoh nama desa dan kecamatan yang menjadi pusat permukiman etnis jawa. Mereka umumnya transmigran yang sudah beranak cucu, lahir dan kemudian meninggal di Lampung.”

Sebagai sebuah potret, tradisi Lampung, juga telah mengenal adanya demokrasi dalam tradisinya, terutama dalam musyawarah untuk mencapai kesepakatan. Ini dijelaskan dalam sistem pemerintahan, lambang rumah adat dan sistem persudaraan, serta sistem mendapatkan kekuasaan sebagaimana adat pepadun. Oleh karena itu, pengembangan demokrasi yang berdasarkan nilai lokal dalam kerangka demokrasi lokal menjadi kewajiban untuk dilakukan. Selain berguna menjaga agar tidak terjadinya konflik etnis, juga karena demokrasi lokal adalah tuntutan dalam perkembangan otonomi daerah.

Karenanya diperlukan berbagai pihak yang dapat meluruskan kembali makna demokrasi yang sesungguhnya. Banyak pihak yang kemudian terlibat dalam pembangunan demokrasi di Lampung, seperti Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), Perguruan Tinggi (PT) dan Mahasiswa serta kelompok lainnya. Salah satu kelompok yang memiliki *fungsi Ideasional* adalah Sastrawan. Sebab Sastrawan memiliki media untuk menggunakan bahasa, salah satu dari fungsi bahasa, menurut Aminuddin (2002:41), fungsi Ideasional yakni fungsi bahasa untuk mengemukakan sesuatu sebagaimana dipresentasikan penuturnya.

Dalam sarasehan nasional, yang kemudian dipublikasikan Harian Pikiran Rakyat, edisi 29 Oktober 1984, Budiman menyatakan Sastrawan harus memiliki *mission* untuk menolong dan mengangkat rakyatnya. Ini menyangkut ideologi sastra yang berusaha memperjuangkan masalah-masalah besar yang di derita bangsanya, seperti Kemiskinan. Menyambut pendapat Budiman tersebut, Haryanto (1985:131) mengemukakan bahwa yang terpenting setiap sastrawan harus sadar akan publiknya karena keindahan itu tidak universal. keindahan itu terikat oleh dimensi ruang dan waktu, yang indah di Amerika belum tentu indah di Indonesia.

Wacana pembinaan demokrasi dengan cara membangkitkan semangat politik bagi masyarakat juga dibawa sastrawan melalui karya-karyanya dan beragam kegiatan yang telah dilaksanakan. Atau penemuan usaha demokratisasi

tersebut juga dapat dilihat dalam kelompok-kelompok Sastrawan yang memiliki program dalam pelaksanaan proses kesusastraan.

Gambaran diatas menjelaskan bahwa sastrawan adalah bagian terpenting dalam melihat dan sekaligus melakukan proses-proses demokrasi, terutama nilai demokrasi yang dibawa oleh tradisi lokal itu sendiri. Jika berbicara dari sisi lahirnya sastra sebagai sebuah karya, maka gambaran yang muncul adalah relativitas sastra antara satu dengan yang lainnya. Oleh sebab itu, sastrawan adalah pribadi dan kelompok.

Pribadi, karena sastrawan lahir secara individu dan menghasilkan karya secara individu. Namun kecendrungan tersebut tidak lebih dari pada karena proses pembuatan karya sastra. Sedangkan dalam hal berkomunikasi dan berinteraksi dengan lainnya, seorang sastrawan memerlukan kelompok dengan manusia lainnya, sebagaimana fitrah tuhan bahwa manusia mahluk sosial.

Kelompok-kelompok sastrawan muncul dan diciptakan seringkali tergabung dengan Dewan Kesenian yang berada disetiap Propinsi, bahkan juga berada di Kabupaten/Kota. Di Lampung, sejak tahun 1993, Dewan Kesenian Lampung (DKL) telah terbentuk berdasarkan atas inisiasi Sastrawan Lampung. DKL sendiri adalah organisasi gabungan dari kelompok seniman di Lampung yang melakukan pembinaan Kesenian di Lampung.

Maraknya kelompok sastrawan tidak hanya dengan organisasi formal (yang disetujui pemerintah), tapi juga atas lembaga–lembaga independen. Disini, muncul kelompok–kelompok teater-teater yang tidak hanya mementaskan teater, tapi juga melakukan pengkajian terhadap sastra. Beragam organisasi seniman lain pun muncul, terutama dalam pengkajian dan pelatihan terhadap anggotanya di bidang sastra.

Lebih jelas nya Karzi dalam Cybersastra (14/01/2015) memberikan pilihan mengenai siapa yang disebut sebagai sastrawan Lampung yaitu: Pertama, Sastrawan Lampung adalah sastrwan yang menulis karya sastra dalam bahasa Indonesia dan iya tinggal di Lampung. Dengan kata lain sastrawan Lampung adalah sastrawan indonesia yang tinggal di Lampung. Kedua, Sastrawan Lampung adalah sastrawan yang menulis karya sastra dalam bahasa Lampung dan dirinya tidak berdomisili di Lampung.

Maka sastrawan Lampung adalah sastrawan yang memiliki dua atau salah satu dari pengertian tersebut. Sastrawan Lampung diharapkan mampu memberikan sumbangan bagi perkembangan demokrasi lokal karena memiliki organisasi dan memiliki fungsi penyampaian ide. Sastrawan Lampung dalam hal ini adalah Sastrawan yang tergabung dalam organisasi Dewan Kesenian Lampung. Adanya nilai demokrasi lokal tentunya lebih mudah untuk dilaksanakan karena merupakan akar budaya lokal yang sudah ada di Lampung. Kalangan sastrawan yang tergabung menjadi pengurus DKL

diharapkan mencatat, mengimplementasikan serta melakukan pembinaan agar demokrasi lokal tetap lestari. Disinilah letak upaya sastrawan dalam membongkar kegiatan yang dapat dikatakan tidak demokratis, sekaligus berguna sebagai usaha pengembangan demokrasi lokal di Lampung.

Upaya sastrawan Lampung terutama sastrawan pengurus Dewan Kesenian Lampung dalam upaya mengembangkan dan melestarikan demokrasi lokal Lampung dengan melakukan berbagai kegiatan seni yang mengandung pesan moral sehingga dapat menjaga dan melestarikan budaya lokal yang ada. Berikut bentuk kegiatan seni yang dilakukan sastrawan Lampung dalam upaya pengembangan demokrasi lokal:

1. Gitar tunggal diiringi dengan gamolan;
2. Tari bedana diiringi dengan gambus satu gitar;
3. Pantun cangget diiringi dengan kulintang;
4. Dikir lama dikalaborasi dengan condong atau saxophone.

Namun dalam upaya pengembangan demokrasi lokal di Lampung mengalami berbagai kendala salah satunya dikarenakan masih banyak masyarakat Lampung yang bersifat ortodok disinilah seharusnya peran DKL untuk dapat merangkul tokoh Adat, tokoh Agama dan masyarakat disekitar yang berbeda suku dengan suku Lampung, sehingga tercapailah kehidupan yang bebas, adil dan damai sesuai dengan cita-cita demokrasi.

## **B. Rumusan Masalah**

Apa saja upaya-upaya yang dilakukan Sastrawan dalam mengembangkan Demokrasi Lokal di Lampung?

## **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan Penelitian ini untuk menemukan dan mengetahui upaya-upaya yang dilakukan sastrawan dalam mengembangkan Demokrasi Lokal di Lampung.

## **D. Kegunaan Penelitian**

sejalan dengan tujuan penelitian sebagaimana dirumuskan di atas maka penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk:

### **1. Kegunaan Teoritis**

Secara Teoritis, kegunaan penelitian ini untuk mengetahui keterkaitan antara konsepsi dasar demokrasi lokal dengan program kelompok sastrawan (Dewan Kesenian Lampung).

### **2. Kegunaan Praktis**

Sedangkan kegunaan secara praktis penelitian ini berguna sebagai pengukur keterlibatan sastrawan lampung dalam upaya pengembangan demokrasi lokal dan dapat dijadikan pedoman oleh kelompok sastrawan tersebut.

## **II. TINJAUN PUSTAKA**

### **A. Konsep Demokrasi**

#### **1. Konsep Dasar Demokrasi**

Ide dasar demokrasi berasal dari teori–teori rasionalitas yang didasarkan pada universalitas hukum alam yang menjelaskan tentang kedaulatan masyarakat sebagai individu–individu dan makhluk sosial, hingga nilai-nilai tersebut terus berkembang seiring dengan pergerakan dan pergeseran pada dinamika sosial moderen (Dahl:1985)

Menurut Rais (1986) dalam pengantarnya pada buku Demokrasi dan Proses Politik, paling tidak ada tiga macam asumsi yang membuat demokrasi memiliki citra positif, sebagai berikut:

1. Demokrasi tidak saja merupakan bentuk vital dan terbaik yang mungkin diciptakan, tetapi merupakan suatu doktrin politik luhur yang akan memberikan manfaat bagi kebanyakan negara.
2. Demokrasi sebagai sistem politik dan pemerintahan, dianggap mempunyai akar sejarah yang panjang, sampai ke zaman Yunani kuno, sehingga

demokrasi mampu tahan terhadap perubahan zaman dan dapat menjamin terciptanya suatu lingkungan politik yang setabil.

3. Demokrasi dipandang sebagai suatu sistem yang paling alamiah dan manusiawi, sehingga semua rakyat di Negara manapun akan memilih demokrasi bila mereka diberi kebebasan untuk melakukan pilihan.

Rais (1986) juga langsung memberikan kriteria demokrasi yaitu sebagai berikut:

1. Partisipasi dalam membuat keputusan;
2. Persamaan hak didepan hukum;
3. Ditribusi pendapat secara adil;
4. Kesempatan meraih pendidikan yang sama;
5. Kebebasan berpendapat, berkumpul, berserikat dan beragama;
6. Ketersediaan dan keterbukaan informasi;
7. Mengindahkan tata krama politik;
8. Kebebasan individu;
9. Semangat kerja sama.

Menyimak perkembangan tentang demokrasi, Uhlin (1998) mengungkapkan sebagai berikut:

“Pembicaraan sumber-sumber nilai demokrasi yang berkembang di Indonesia, demokrasi tidak hanya ide Barat dan model demokrasi liberal dari Barat bukanlah satu-satunya bentuk demokrasi yang mungkin. Banyak aktivis gerakan prodemokrasi di Indonesia mendapatkan

demokrasi tidak hanya dari pemikiran liberal Barat tapi juga dari Marx dan Al-Quran, serta dari nilai-nilai tradisional Indonesia.”

Mengutip Mill (Hoogerwef,1981:174) memberikan penjelasan mengenai demokrasi sebagai berikut:

“Seandainya semua orang kecuali satu mempunyai pendapat yang sama, dan hanya satu orang yang mempunyai pendapat yang bertentangan, maka seluruh umat manusia itu tidak berhak membungkam seseorang itu, sebagaimana orang yang satu tidak berhak seandainya iya mempunyai kekuasaan untuk membungkam umat manusia itu.”

Untuk meyakinkan pendapat tersebut, Hoogerwef(Neibuhr,1981:174), sebagai berikut:“Kecakapan indonesia untuk berbuat adil memungkinkan demokrasi dan kecendrungan manusia untuk berbuat tidak adil menyebabkan demokrasi sangat dibutuhkan”.Lebih jelasnya lagi, Hoogerwef (1981:176) menilai bahwa demokrasi sendiri bukan hanya merupakan tujuan seperti berikut:

“Demokrasi juga tujuan antara menuju tujuan–tujuan yang lebih jauh. Sesuai dengan tujuan–tujuan itu, maka pandangan mengenai jenis demokrasi yang diperlukan akan berbeda–beda pula yang penting bagi pemikiran mengenai demokrasi politik iyalah pertanyaan apakah demokrasi dilihat sebagai tujuan antara menuju kebebasan, persamaan atau kebersamaan dan toleransi.”

Sebagai yang ideal, demokrasi menurut Dhal (1985:10–11) mempunyai lima kriteria yaitu sebagai berikut: persamaan hak pilih, partisipasi efektif, pembeberan kebenaran, kontrol terhadap agenda dan pencakupan.Suryomiharjo (LP3ES:1986:64) memberikan pandangan mengenai demokrasi dilihat dari demokrasi sebagai cita–cita sebagai berikut:

“Menurut konsep itu, maka gambaran masyarakat yang dicita-citakan ialah (seperti dalam keluarga) dimana setiap orang sama derajatnya, sama haknya, sama bebas dan merdeka. Akan tetapi apabila kebebasan akan mengganggu ketertiban dan keselamatan masyarakat banyak, harus ada penyelamatan tindakan yang tegas bilaperlu secara keras menghukum pengganggu-pengganggu ketertiban.”

Setiap bangsa memiliki wawasan (carapandang) terhadap diri dan lingkungannya, demikian juga bangsa Indonesia memiliki cara pandang terhadap dirinya maupun lingkungannya. Terhadap dirinya, bangsa Indonesia memandang bahwa wilayah Indonesia adalah kepulauan, dan bangsa Indonesia adalah heterogen. Sebagai negara kepulauan (wilayahnya) yang heterogen (bangsanya), Pancasila sebagai sarana perekat dan Bhineka Tunggal Ika sebagai komitmen dalam rangka pelaksanaannya.

Pancasila dan Bhineka Tunggal Ika, merupakan kebutuhan bagi kelangsungan hidup bangsa yang wilayahnya kepulauan dan bangsanya heterogen. Pancasila merupakan ruang yang nyaman bagi berkembangnya keanekaragaman (heterogenitas) dan Bhineka Tunggal Ika sebagai basis kesadaran identitas bangsa yang menempati ruang Pancasila.

Implementasi Pancasila dan Bhineka Tunggal Ika yang berupa hukum positif tidak akan bermanfaat tanpa diikuti oleh penegakan hukum. Suatu norma, nilai, aturan, hukum baru berguna jika ada penegakan hukum, dan hal ini akan tercipta jika penegak hukum berwibawa. Heterogenitas adalah *De Facto* dan demokrasi Pancasila adalah solusi dan ruang dalam mengembangkan

heterogenitas dan Bhineka Tunggal Ika adalah jiwa yang mendorong perkembangan demokrasi Pancasila.

## **2. Upaya Pengembangan Demokrasi**

Pye (Sudarsono, 1985:23). menjelaskan bahwa salah satu dari kriteria pembangunan politik adalah pembinaan demokrasi. Pye mengingatkan bahwa pembangunan politik seharusnya sama dengan diciptanya lembaga–lembaga dan praktek–praktek demokrasi Menurut Pye (Haryanto, 1998:5), unsur persamaan dalam pembangunan politik berkenaan dengan masalah partisipasi massa dan keterlibatan rakyat dalam kegiatan–kegiatan politik, baik yang dimobilisasi secara demokratis maupun secara totaliter. Dalam hal ini dituntut adanya pelaksanaan hukum secara universal, dimana semua orang lemah atau kuat harus taat pada hukum yang sama.

Secara garis besar Pye (Haryanto, 1998:4), menyimpulkan tema–tema yang berhubungan dengan pembangunan politik sebagai pertambahan persamaan antara individu dalam hubungannya dengan sistem politik, pertambahan kemampuan sistem politik dalam hubungannya dengan lingkungannya, dan pertambahan pembedaan lembaga dan struktur didalam sistem politik. Menurut Pye, ketiga dimensi itu ada pada “dasar dan jantung” proses pembangunan itu sendiri, Pye (1998:4) menegaskan bahwa pembangunan merupakan proses penguatan nilai–nilai dan praktek demokrasi kapitalis Barat.

Sependapat dengan Huntington (Haryanto,1998:7–9), menambahkan mengenai aspek pembangunan politik sebagai berikut:

“Disisi lain Huntington melihat pemabangunan politik sebagai suatu aspek dari adanya modernisasi. Lebih jauh Huntington melihat aspek yang paling penting dari modernisasi politik dapat di kristalisasi dalam tiga kategori utama. Pertama, modernisasi politik melibatkan adanya rasionalisasi kekuasaan, pergantian sejumlah besar pejabat-pejabat politik tradisional, etnis, keagamaan, kekeluargaan dan kekuasaan nasional yang bersifat sekuler. Kedua, pembangunan politik melibatkan differensiasi fungsi politik yang baru dan pengembangan struktur khusus sebagai pelaksanaan seluruh fungsi politik yang baru dan pengembangan struktur khusus sebagai pelaksanaan seluruh fungsi tersebut. Ketiga, pembangunan politik ditandai oleh meningkatnya peran serta politik seluruh lapisan masyarakat.”

Demokrasi saat ini bukan hanya kekuasaan rakyat yang melakukan pemilihan umum. Namun dalam pengembangannya demokrasi menjadi lebih luas dan diterapkan dalam berbagai kehidupan masyarakat seperti dalam bidang ekonomi, pendidikan, social dan budaya, dan bidang kemasyarakatan yang lainnya.

Demokrasi tidak hanya diterapkan dalam kehidupan bernegara namun dalam pengembangannya demokrasi juga diterapkan dalam kehidupan bermasyarakat dan berbangsa. Kehidupan yang demokratis adalah kehidupan yang melibatkan partisipasi rakyat dan ditujukan untuk kepentingan rakyat. Dalam pelaksanaanya demokrasi dikembangkan dalam berbagai hal. Demokrasi dikembangkan menjadi segala hal yang menyangkut kekuasaan

yang diperuntukkan untuk rakyat. Beberapa bentuk pengembangan demokrasi adalah sebagai berikut:

### 1. Bentuk Pemerintahan

Seperti yang telah dibahas dalam makna demokrasi, demokrasi merupakan suatu bentuk pemerintahan yang dipegang dan dijalankan oleh rakyat serta pemerintahan dilakukan untuk rakyat. Bentuk pemerintahan demokrasi ini adalah bentuk pemerintahan yang baik selain bentuk pemerintahan monarki dan aristokrasi. Karena pemerintahan mengutamakan kesejahteraan semua rakyat bukan hanya untuk kepentingan kelompok sendiri dan kepentingan pribadi.

### 2. Sistem Politik

Menurut Mayo dan Huntington demokrasi merupakan suatu sistem politik. Demokrasi adalah sistem politik yang mengambil keputusan berdasarkan suara mayoritas rakyatnya. Di Indonesia sistem politik demokrasi adalah pancasila. Budaya demokrasi pancasila merupakan paham demokrasi yang berpedoman pada asas kerakyatan yang di pimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan yang berketuhanan yang Maha Esa, berkemanusiaan yang adil dan beradab, bersatu persatuan Indonesia, dan bersama sama menjiwai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Budaya demokrasi pancasila mengakui adanya sifat kodrat manusia sebagai makhluk individu dan makhluk sosial dalam kehidupan masyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Rumusan sila keempat Pancasila sebagai dasar filsafat Negara dan dasar politik Negara yang di dalamnya terkandung unsure kerakyatan, permusyawaratan, dan kedaulatan rakyat merupakan cita-cita kefilosofan dari demokrasi Pancasila. Oleh sebab itu, perilaku budaya demokrasi yang perlu di kembangkan dalam kehidupan sehari-hari adalah sebagai berikut:

#### 1. Menjunjung tinggi persamaan

Budaya demokrasi mengajarkan bahwa setiap manusia memiliki persamaan harkat dan derajat dari sumber yang sama sebagai makhluk ciptaan yang maha esa. Oleh sebab itu, dalam kehidupan sehari-hari hendaknya kita mampu membuat dan bertindak untuk menghargai orang lain sebagai wujud kesadaran diri untuk menerima keberagaman dalam masyarakat. Menjunjung tinggi persamaan mengandung makna bahwa kita mau berbagi dan terbuka menerima perbedaan pendapat, kritik dan saran dari orang lain.

#### 2. Menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban

Setiap manusia menerima fitrah hak asasi dari Tuhan yang maha esa berupa hak hidup, hak kebebasan, dan hak memiliki sesuatu. Penerapan hak-hak tersebut bukanlah sesuatu yang mutlak tanpa batas. Dalam kehidupan bermasyarakat, ada batas-batas yang harus di hormati bersama berupa hak-hak yang dimiliki orang lain sehingga batasan norma yang berlaku dan di patuhi. Untuk itu, dalam upaya mewujudkan tatanan

kehidupan sehari-hari yang bertanggung jawab terhadap Tuhan, diri sendiri, dan orang lain perlu dengan sebaik-baiknya.

### 3. Membudayakan sikap yang adil

Salah satu perbuatan mulia yang dapat diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari baik kepada diri sendiri maupun kepada orang lain adalah mampu bersikap bijak dan adil. Bijak dan adil dalam makna yang sederhana adalah perbuatan yang benar-benar dilakukan dengan perhitungan, mawas diri, mau memahami yang dilakukan orang lain dan proporsional. Masyarakat kita perlu mengembangkan budaya bijak dan adil dalam rangka mewujudkan kehidupan yang saling menghormati harkat dan martabat orang lain, tidak diskriminatif, terbuka, dan menjaga persatuan dan kesatuan lingkungan masyarakat sekitar.

### 4. Membijaksakan musyawarah mufakat dalam mengambil keputusan

Mengambil keputusan melalui musyawarah mufakat merupakan salah satu nilai dasar budaya bangsa Indonesia yang sejak lama telah dipraktikkan masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Dalam musyawarah mufakat terkandung makna bahwa pada setiap kesempatan yang berhubungan dengan pengambilan keputusan diperlukan kesadaran dan kearifan untuk memutuskan. Untuk itu, sebelum suatu keputusan diterapkan selalu di dahului dengan dialog dan mau mendengar dari berbagai pihak, juga selalu di upayakan untuk memahami terlebih dahulu persoalan-persoalan yang ada. Keputusan dengan musyawarah mufakat akan menghasilkan

keputusan yang mampu memuaskan banyak pihak sehingga dapat terhindar dari konflik-konflik vertical maupun horizontal.

#### 5. Mengutamakan persatuan dan kesatuan nasional

Dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, sikap untuk lebih mengutamakan kepentingan orang lain/umum dari kepentingan pribadi yang sangat penting untuk di tumbuhkan. Kesadaran setiap warga negara untuk mengutamakan persatuan dan kesatuan merupakan wujud cinta dan bangsa terhadap bangsa dan negara. Kita harus mampu berfikir cerdas dan bekerja keras untuk kepentingan dan kemajuan bangsa dan negara melalui berbagai bidang kehidupan yang dapat kita lakukan. Makna penting dalam memahami sikap mengutamakan persatuan dan kesatuan adalah bagai mana kita mampu berbuat tanpa pamrih untuk kepentingan bangsa dan negara.

### 3. Organisasi Pembina Demokrasi

Menurut Kaylan (2007). Organisasi merupakan komunitas kelompok manusia yang menjadikan pemimpin sebagai pusat pertimbangan. Pemimpin dalam Organisasi adalah representasi dari kebijaksanaan mayoritas dan dianggap sebagai prinsip kesamaan. Lebih daripada itu Organisasi akan berjalan dengan sistem kekuasaan bebas yang dibatasi oleh musyawarah bersama

Menurut Dahl (1985:1) bahwa dalam demokrasi dibutuhkan organisasi-organisasi yang bebas, paling tidak dalam demokrasi bersekala luas, seperti sebagai berikut:

“Apabila proses-proses demokrasi digunakan dalam skala yang luas seperti negara, bangsa, maka organisasi-organisasi yang otonom pasti akan terwujud. Meskipun demikian ini lebih merupakan konsekuensi langsung dari demokratisasi pemerintahan negara dan bangsa. Ini juga penting demi berfungsinya proses demokrasi itu sendiri, memperkecil tekanan pemerintah, meningkatkan kebebasan politik dan tingkat kesejahteraan manusia.”

Hoogerwef (1981:175) berpandangan bahwa tingkat demokrasi dapat dicapai dengan bermacam-macam cara. Gudang sarana untuk memungkinkan anggota-anggota kelompok mempengaruhi kebijaksanaan pada dasarnya tidak terbatas. Pemilihan-pemilihan merupakan hanya satu dari sarana-sarana itu. Sarana-sarana lain seperti peraturan mayoritas, tetapi juga peraturan untuk melindungi minoritas-minoritas, keterbukaan, kebebasan mengemukakan pendapat, naik banding terhadap keputusan-keputusan, aktivitas politik melalui kelompok penekan dan badan-badan pertimbangan dan jaminan kebebasan pribadi.

Mengenai organisasi pembinaan demokrasi Dahl (1985:44) memberikan penjelasan sebagai berikut:

“Tentang organisasi partial social, persekutuan, kelompok dan subsistem tidak akan pernah habis, dan dalam berbagai kesempatan dan tempat, berbagai persekutuan yang berbeda dan telah menuntut ukuran kebebasan dari negara dan persekutuan lainnya. Mungkin yang paling awala

menuntut kedudukan yang adil sebagai persekutuan yang otonom adalah sekelompok orang yang berafiliasi dengan erat berdasarkan ikatan–ikatan persaudaraan antara sesama mereka, seperti tali kekeluargaan.”

Untuk menjelaskan betapa perlunya organisasi yang melakukan pembinaan demokrasi dalam sebuah negara, Dhal (1985:251) memberikan pendapat sebagai berikut:

“Dalam sistem politik selebar negara, pluralitas relatif organisasi–organisasi independen tidak hanya dimaksudkan untuk pengawasan timbal balik tetapi juga untuk proses demokrasi. Diterapkan pada skala seluas negara, proses demokrasi secara timbal balik relatif telah memungkinkan munculnya organisasi yang independen, bahkan kehadirannya tidak dapat dielakkan.”

Menurut Kaylan ( 2007). Organisasi merupakan komunitas kelompok manusia yang menjadikan pemimpin sebagai pusat pertimbangan. Pemimpin dalam Organisasi adalah representasi dari kebijaksanaan mayoritas dan dianggap sebagai prinsip kesamaan. Lebih daripada itu Organisasi akan berjalan dengan sistem kekuasaan bebas yang dibatasi oleh musyawarah bersama. Adapun contoh organisasi demokrasi yang ada di masyarakat saat ini seperti DPR, DPRD, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), Pemuda Pancasila, FPI (Front Pembela Islam) dan Ormas-ormas lainnya.

Pembinaan demokrasi dalam bentuk sistem pemerintah suatu negara sebagai upaya mewujudkan kedaulatan rakyat atas negara untuk dijalankan oleh pemerintah negara tersebut. Adapun tujuan pembinaan demokrasi sebagai upaya untuk menciptakan kehidupan yang damai adil dan beradab dan

terpenuhi kebutuhan hidupnya sebagaimana yang terkandung dalam panca sila, sila ke empat.

## B. Demokrasi Lokal

Demokrasi lokal merupakan demokrasi yang terjadi di level lebih bawah dari hirarki pemerintahan suatu negara. Sementara itu, kajian Birokrasi dan Demokrasi utamanya ditujukan mengefektifkan tujuan-tujuan pemerintahan demokrasi dalam memenuhi janji terhadap para konstituen. Salah satunya adalah, lewat penitikberatan pada kinerja birokrasi. Publik diarahkan lebih mendekati kerja-kerja nyata pemerintahan, tidak seperti kondisi saat ini yang seperti teralienasi dari implementasi perilaku pemerintah.

Dengan kata lain, diupayakan suatu pengalihan titik perhatian dari aspek input sistem politik kepada output. Salah satu upaya kearah pemberdayaan partisipasi politik public ini adalah dengan demokrasi tingkat local. Jarak antara konstituen dengan pejabat public terpilih relative lebih dekat dengan daerah ketimbang pusat. Terlebih kini daerah telah punya kewenangan yang semakin besar dalam memproduksi dan mengimplentasikan kebijakan yang punya efek atas masyarakat.

Menurut Karim, dari *www. Iregyogya.com*, bahwa dalam waktu yang cukup lama, praktek-praktek demokrasi yang paling *genuine* yang biasanya dapat ditemui di lingkungan pedesaan perlahan tapi pasti terlunturkan maknanya.

Hal ini berkaitan dengan masuknya otoriterisme negara ke desa , serta berjalannya mekanisme yang sangat bias dimana banyak kearifan lokal harus mengalah terhadap nilai modern yang diklaim lebih universal.

Pendapat serupa juga diliris oleh situs [www.dte.gn.apc.org](http://www.dte.gn.apc.org), sebagaiberikut:

“satu-satunya jaminan yang sesungguhnya atas pemerataan pembangunan adalah sebuah proses pengambilan keputusan ditingkat desa yang melibatkan semua orang (khususnya wanita dan kelompok masyarakat bawah), yang dinamis, terbuka, transparan, dan adanya kebijakan yang bisa dipertanggung jawabkan pada tingkat masyarakat. Lembaga-lembaga hukum akan bekerja dengan sebaiknya jika mereka bekerja sejajar dan bukan sebagai bagian dari administrasi umum.”

Menurut Prihatmoko (Suara Merdeka Jumat 19 Nopember 2004), peningkatan kualitas demokrasi lokal dipengaruhi oleh sejumlah faktor yang lazim disebut prakondisi demokrasi lokal. Prakondisi demokrasi tersebut mencakup: (1) kualitas DPRD yang baik; (2) sistem rekrutmen DPRD yang baik, kompetitif, selektif dan akuntable; (3) partai yang berfungsi; (4) pemilih yang kritis dan rrasional; (5) kebebasan dan konsisten pers; (6) LSM yang solid dan konsisten; (7) keberdayaan masyarakat madani.

Namun menurut Widodo (Kimura:1999) sebagaimana yang dipublikasikan dalam [www.Indipit.org](http://www.Indipit.org), menjelaskan kemungkinan tidak terlaksananya demokrasi lokal dengan baik sebagaiberikut:

“Meski demikian perlu disadari pula bahwa tidak ada jaminan sama sekali bahwa model demokrasi lokal jauh lebih bersih, aspiratif dan efektif dibanding dengan demokrasi tingkat pusat, seseorang pengamat Indonesia di Jepang justru melihat politikus lokal sebagai kendala utama bagi proses demokratisasi, iya mengatakan, “politikus lokal kebanyakan lebih bersikap tradisional, otoriter dan didominasi oleh kelas elite daerah yang berwawasan sempit, serta kurang terbiasa dengan demokratisasi dan keterbukaan informasi dibanding politikus nasional.”

Lebih lanjut, dalam analisisnya Widodo dalam [www.indipit.org](http://www.indipit.org) menjelaskan mengenai demokrasi lokal sebagai berikut:

“para penganjur demokrasi lokal sering memakai argumen bahwa dalam ukuran kecil seperti negara kota, potensi demokrasi lebih besar ketimbang pemerintahan rakyat dalam ukuran besar. Namun sesungguhnya paradigma ini sudah lama ditinggalkan dan banyak negara maju yang menggabungkan daerah-daerah kecil agar menjadi lebih besar tanpa mengorbankan demokrasi.”

Menurut Widodo yang kita butuhkan selanjutnya adalah desentralisasi tahap kedua dari daerah kepada masyarakat, namun jelas dibutuhkan waktu yang cukup panjang untuk sampai pada tahap ini. Jika kita telah sampai pada tahap ini maka konsep *government* yang telah berevolusi menjadi *governance* akan berproses lagi menjadi *community governance* atau *citizen governance* Box (1998).

Lampung telah Lama mengenal demokrasi lokal sebagaimana pedoman masyarakat Lampung yaitu Piil-Pesenggiri yang didalamnya terdapat unsur-unsur kehidupan salahsatu diantaranya Nengah Nyappuryang mengajarkan menyelesaikan masalah secara musyawarah dan mufakat begitu juga dalam

pengambilan keputusan sehingga masyarakat asli Lampung dapat hidup berdampingan dengan masyarakat pendatang meskipun berbeda etnis masyarakat Lampung dapat hidup damai dan saling menghormati diantara keragaman etnis penduduk yang ada.

### C. Demokrasi Dalam Budaya Lampung

Banyak pandangan tentang perjalanan demokrasi di Lampung, pemikiran yang sejalan dengan konsepsi demokrasi sudah ada, hal itu diungkapkan dalam *Sejarah Daerah Lampung* yang diterbitkan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kantor Wilayah Propinsi Lampung (1997/1998:101). Masih dari sumber yang sama *Sejarah Daerah Lampung* (1997/1998:101) sebagai berikut:

“sistem kebuayan yang juga disebut sistem marga itu merupakan sistem pemerintahan dikampung yang sudah berkembang sejak lama, terutama di daerah utara yang mempunyai kebuayan, sistem ini menitikberatkan pada musyawarah dan mufakat dengan desentralisasi otonomi dalam pelaksanaannya. Sistem pemerintahan yang berdasarkan desentralisasi ini tidak sesuai dengan kehendak pemerintah belanda. Tetapi pemerintah belanda tidak dapat berbuat banyak karena adat–istiadat Lampung masih dipegang teguh oleh penduduk Lampung.”

Pendapat tersebut hampir serupa dengan Hadikusuma, mengenai musyawarah, Hadikusuma (1990:167) mengemukakan sebagai berikut: “sistem demikian itu sekarang lebih banyak berlaku dalam batas kekerabatan orang Lampung sendiri dalam perkara yang menyangkut adat Lampung terutama dalam pelaksanaan upacara adat cakak pepadun”

Lebih lanjut Hadikusuma (1990:175) mengemukakan sebagai berikut:

“jalan hidupnya dipengaruhi oleh keperibadian harga diri yang oleh belanda disebut *ijdelheid* ( kebangsawanan hampa) yang mengacu kedalam kelompok–kelompok kekerabatan (genealogis) berdasarkan ikatan kebawayan (keturunan). Mereka selalu sejajar dengan orang lain atau kalau bisa lebih dari orang lain dan tidak ingin menggantungkan diri dengan orang lain. Apalagi sifatnya dijajah atau diperhamba.”

Sifat menggunakan musyawarah sebagai cerminan demokrasi ini juga digunakan dalam penyelesaian konflik baik itu sesama suku atau marga maupun dengan suku atau marga lainnya, Hadikusuma (1990:166) menjelaskan sebagai berikut:

“andaikan masih juga terjadi perselisihan antara yang satu dengan yang lainnya dalam pergaulan sehari–hari maka jalan penyelesaian yang ditempuh ialah sesuai dengan keperibadian Lampung, diselesaikan dalam suasana peradilan adat (*dorpjustitie*) dengan musyawarah dan mufakatt secara damai dengan azas kekeluargaan.”

Masih menurut Hadikusuma (1990:176) dalam hal kerjasama atau berusaha bersama dalam bentuk organisasi atau perorangan mereka lebih suka memilih kerja tolong-menolong atau gotong-royong dalam pekerjaan yang halus dan terhormat. Lebih jelasnya menurut Hadikusuma dkk (1996:18), sistem musyawarah yang dipakai oleh suku Lampung ini tergambarkan dalam penjelasan rumah adat Lampung yang salah satu fungsinya sebagai tempat musyawarah yakni pusiban atau tempat siba (tempat menghadap, tempat pertemuan, tempat penyeimbang duduk bermusyawarah).

Sikap ingin bermusyawarah tersebut, menurut Hadikusuma (Yamin, 1953:30) disebabkan orang Lampung mempunyai Piil Pesenggiri. Hadikusuma (1990:15) menjelaskan sebagai berikut:

“Istilah Piil Pesenggiri mengandung arti rasa atau pendirian yang dipertahankan, sedangkan Pesenggiri mengandung arti nilai harga diri. Besar kemungkinan istilah Pesenggiri itu berasal dari nama pahlawan Bali. Pasunggiri yang memberontak terhadap kekuasaan Majapahit dan mengadakan perlawanan pantang mundur terhadap serangan yang dilakukan terhadap Arya Damar dan Gajah mada pada pertengahan abad ke-14.”

Menurut Hadikusuma (1990:15) Piil Pesenggiri itu mengandung komponen sebagai berikut:

1. Pesenggiri, mengandung arti pantang mundur, tidak mau kalah dalam sikap, tindakan dan perilaku;
2. Juluk Adek, mengandung arti suka dengan nama baik dan gelar yang terhormat;
3. Nemui Nyimah, mengandung arti suka menerima dan memberi dalam suasana suka dan duka;
4. Nengah Nyappur, mengandung arti suka bergaul dan bermusyawarah dalam menyelesaikan segala masalah;
5. Sakai sambayan, mengandung arti suka menolong dan bergotong-royong dalam hubungan kekerabatan dan ketetanggaan.

Penjelasan Hadikusuma mengenai Nengah Nyappur, komponen Piiil Pesenggiri yang keempat perlu mendapat perhatian sebagai berikut:

“Dikarenakan iya suka menerima dan memberi, maka iya terbiasa Nengah yaitu ketengah dalam arti bergaul dan terbiasa Nyappur yaitu bercampur dan berinteraksi dengan orang lain terutama dengan orang yang dianggapnya sejajar dengan kedudukan adatnya atau lebih tinggi.”

Djausal (dalam Kompas Cybermedia) mengatakan orang Jawa adalah kelompok mayoritas masyarakat di Lampung, meskipun demikian mereka tak pernah mendominasi atau menguasai warga Pribumi Lampung dalam segala hal seluruh kelompok masyarakat yang ada mampu menjaga keseimbangan dalam berinteraksi.

Dari sisi pengangkatan seseorang menjadi pemimpin adat, masyarakat Lampung menggunakan cara yang berbeda antara orang Lampung yang beradat Saibatin dan Pepadun. Pendapat tersebut dikemukakan Iskandar Syah (*sejarahKebudayaan Lampung, Diktat belajar*).sebagai berikut:

“Kedua masyarakat diatas memiliki adat–istiadat yang berbeda terutama dalam hal pengangkatan seseorang menjadi pemimpin adat. Bagi masyarakat Lampung beradat Saibatin seseorang yang diangkat sebagai pemimpin adat adalah hak waris yang diperoleh secara turun menurun. Kedudukan tersebut ditandai dengan gelar adat yang disandang seseorang. Berbeda dengan masyarakat adat Pepadun, dimana sistem kepemimpinan adat berdasarkan prinsip kebangsawanan, hampir tidak ditemukan. Pada masyarakat ini seseorang berhak semula adalah yang tergolong pendiri kampung. Namun kemudian kedudukan itu dapat diperoleh keturunan pendatang dengan sarat membayar sejumlah uang dan menyembelih beberapa ekor kerbau pada waktu upacara pengambilan gelar (naik pepadun) dan mendapat pengakuan atau pengesahan dari pemimpin adat di desa lingkungan masyarakatnya”

Menurut Abdul Syani dalam (Abdul Syani, 2010: <http://blog.unila.ac.id/abdulsyani/>, yang diakses tanggal 20 Februari 2016, Pukul 19:42 WIB) Pengertian demokrasi dalam budaya Lampung dapat diartikan sebagai berikut:

“Dalam proses kompromi budaya, demokrasi lokal bukan hanya berfungsi menjadi filter ketika terjadi benturan antara budaya lokal dengan tuntutan perubahan. Lebih jauh, nilai-nilai budaya lokal berbicara pada tataran penawaran terhadap sumberdaya nilai-nilai kearifan lokal sebagai pedoman moral dalam penyelesaian masalah ketika sebuah kebudayaan berhadapan dengan pertumbuhan antagonis berbagai kepentingan hidup. Sebagaimana contoh pada kehidupan masyarakat lokal, proses kompromi budaya selalu memperhatikan elemen-elemen budaya lokal ketika berhadapan dengan budaya-budaya yang baru. Kebudayaan sebagai lumbung nilai-nilai budaya lokal bisa menjadi sebuah pedoman dalam upaya merangkai berbagai kepentingan yang ada secara harmonis, tanpa ada pihak yang dikorbankan.”

#### **D. Penyebab dan Tujuan Demokrasi Lokal**

Indonesia merupakan negara kepulauan yang sangat luas sehingga tidak mungkin bila kekuasaan tidak dibagi-bagi kepada masing-masing kepala daerah. Penyebab dilakukannya demokrasi lokal agar pemerintah daerah mampu mengurus urusan rumah tangga nya sendiri dikarenakan yang mengetahui urusan suatu daerah yaitu kepala daerah itu sendiri dan mencegah kekuasaan yang sentralistik.

Marilah lihat perjalanan kebijakan desentralisasi tahun 1999, tujuan utama reformasi pemerintahan daerah lewat kebijakan desentralisasi tahun 1999 adalah disatu pihak membebaskan pemerintah pusat dari beban-beban yang

tidak perlu dalam menangani urusan domestik, sehingga lebih mampu berkonsentrasi pada perumusan kebijakan makro nasional yang bersifat strategis dan memahami berbagai kecenderungan global yang sangat dinamis.

Dilain pihak, dengan desentralisasi kewenangan pemerintah kepada daerah dan kreativitas daerah akan terpacu, sehingga kapabilitas daerah dalam mengatasi berbagai masalah domestik akan semakin kuat. Agar pemerintah daerah melaksanakan kewenanganya dengan bertanggung jawab, pemerintah pusat melakukan supervisi, mengawasi, memantau, dan mengevaluasi penyelenggaraan pemerintah daerah.

#### **E. Sastra dalam Demokrasi**

Untuk menjelaskan sastra, dapat dianalisis dalam pendapat Soeratno, (Jabrohim,2002:9) sebagaiberikut:

“istilah sastra dipakai untuk menyebut gejala budaya yang dapat dijumpai pada semua masyarakat, meskipun secara sosial, ekonomi dan keagamaan keberadaannya tidak merupakan keharusan. Keriteria kesastraan yang ada dalam suatu masyarakat tidak selalu cocok dengan kriteria kesastraan yang ada pada masyarakat lain.”

Politik wacana, menurut Geertz (Latif dan Ibrahim,1996:26), berakar pada persaingan anantara kelompok yang bertarung tidak hanya kekuatan politik dan ekonomi, namun hak untuk mendefinisikan kebenaran, keadilan, keindahan, moralitas, hakikat sejati kenyataan, membabi buta tak terkendali oleh

institusi–institusi politik resmi. Melihat wacana sastra dalam politik, Haryanto (1985:40) memberikan ulasan sebagai berikut:

“sastra tidak pernah terlepas dari politik atau tidak pernah terlepas dari kepentingan–kepentingan politis pihak–pihak tertentu dalam masyarakat yang bersangkutan. Hubungan antara sastra dan politik bukan hanya sebagai dua hal yang mandiri yang mempunyai persinggungan–persinggungan di tepi wilayah masing–masing.”

Dalam pandangan Foulcher (1884:11-12) sebagaimana dikutip Haryanto (1985:58), kegiatan bersastra merupakan tindakan pengamalan ideologi dan apa yang ditampilkan sebagai perbedaan antara seni dan ideologi pada kenyataannya suatu pilihan antara ideologi–ideologi yang saling bersaing dan dampaknya dalam kegiatan sosial budaya.

Pandangan tersebut menurut Haryanto (1985:60) lebih menyarankan agar paham politik diatas seni sebagai berikut:

“Pemakaian (secara cukup kaku) kategori–kategori sastra dan politik di Indonesia dimasa ini sudah sedemikian meresap dalam benak dan bahasa kita. Maka amat sulit bagi siapa saja untuk menghindari dari pengaruh kecendrungan demikian termasuk bagi mereka yang berminat sungguh–sungguh untuk mencari hubungan diantara keduanya keperihatinan Y.B Mangunwijaya (1984) atas keterpisahan antara sastra dan politik, serta harapannya agar keduanya diakrabkan. Itu bukanlah satu–satunya contoh tentang kuatnya pengaruh pengertian sastra yang terpisahkan dari politik, sampai–sampai para cendekiawan kita tak sepenuhnya bebas dari pengaruh tersebut.”

Said(Haryanto,1985:63) mencontohkan di Indonesia yang hanya sesekali berbicara persoalan yang berbau politik dalam sastra. Menurutnya, orang boleh menyinggung–nyinggung politik dalam forum sastra tapi dalam pembicaraan seperti itu pembahasan tentang politik terbatas pada politik sang sastrawan diluar kesastrawannya, diluar karya sastranya, atau persoalan–persoalan politis yang ikut menjadi bagian dari karya sastra.

Demokrasi tidak bisa terlepas dari sastra dikarenakan sastra merupakan cara penyampain demokrasi dalam sebuah sastra tentu kita mengenal puisi atau prosa. Puisi yang lebih bebas, kadang berisi juga tafsir yang luas. Sementara prosa adalah sedikit yang lebih tertata dengan segala bentuk dan iringan tanda bacanya. Demokrasi di Indonesia bisa kita sama artikan dengan sastra. Dimana sebagai ide demokrasi bisa sama seperti puisi yang memiliki kebebasan dalam penafsirannya. Tapi demokrasi dalam sebuah wujud adalah sebuah prosa dimana kita harus taat pada setiap ejaannya.

Membaca demokrasi dari setiap hurufnya. Demokrasi dalam huruf ada yang konsonan ada juga yang vokal. Lalu anggaplah setiap huruf dalam demokrasi ini sebagai suara dari setiap warga negara dalam kancah demokrasi. Konsonan dapat disamakan seperti warga negara yang paling dominan dan mampu menjadi bagian dari proses demokrasi tapi lebih banyak memilih untuk diam. Sementara vokal adalah bagian yang cukup sedikit namun memberi dampak pada suara dalam demokrasi.

## F. Sastrawan Penyampai Ide

Sastrawan adalah sebutan bagi penulis sastra, pujangga, ahli sastra, intelektual, sarjana; atau cendekiawan dan jauhari dalam diksi klasik. Sastra adalah bahasa (kata-kata, gaya bahasa) yang dipakai dalam kitab-kitab (bukan bahasa sehari-hari), kesusastraan, kitab suci Hindu, kitab ilmu pengetahuan, kitab, pustaka, primbon (berisi ramalan, hitungan, dsb)

Salah satu dari fungsi bahasa, menurut Aminudin (2002:41), adalah fungsi ideasional yaitu fungsi bahasa untuk mengemukakan sesuatu sebagaimana dipresentasikan penuturnya. Dalam sarasehan nasional, yang kemudian dipublikasikan Harian Pikiran Rakyat, edisi 29 oktober 1984, Budiman menyatakan sastrawan harus mempunyai *mission* untuk menolong dan mengangkat rakyatnya. Ini menyangkut ideologi sastra yang berusaha memperjuangkan masalah-masalah besar yang diderita bangsanya, seperti kemiskinan.

Mengutip Budiman (Haryanto, 1985:131) mengemukakan sebagai berikut:

“yang terpenting setiap sastrawan harus sadar akan publiknya karena keindahan itu tidak universal, keindahan itu terikat oleh dimensi ruang dan waktu, yang indah di Amerika belum tentu indah di Indonesia. Mengenai publik karya seni ini, Arifin C. Noer, menandakan bahwa publiknya adalah terbuka, siapa saja”

Dalam forum yang sama sebagaimana dikutip Haryanto (1985:132), Budiman menyatakan adalah teragis kalau ada sastrawan kita yang tidak mencipta untuk publik, namun untuk mencari kepuasan sendiri. Namun walau mereka mengatakan tidak berpublik, sebenarnya mereka ini kesusupan untuk menciptakan publik tertentu yang tidak terucapkannya.

SastrawanMassardi (Haryanto,1985:137), menawarkan sastra dangdut atau sastra mayoritas yang menjangkau publik seluas mungkin.“Sastra dangdut mendapatkan hakikat dari kebebasan ekspresinya. Iya hanya perlu diciptakan, di produksi dan dilempar kepasar.” Mendukung pernyataan tersebut Haryanto (1985:138), pun menyatakan berpihak pada sastra yang lebih bersifat sosial. “Karena sastra kontekstual berangkat dari pandangan bahwa sastra lahir bertumbuh dalam sebuah konteks, tidak dari awang–awang”. Pandangan tersebut juga digaris bawahi budiman (Haryanto,1985:138), yang menilai sastra Indonesia selama ini belum akrab dengan masyarakat, iya menawarkan hendaknya sastra Indonesia mendefinisikan publiknya.

#### **G. Peran DKL dalam Pembinaan Sastra**

Dewan Kesenian Lampung (DKL), telah berdiri selama 23 tahun merupakan fasilitator dan bertanggungjawab terhadap peningkatan kesenian Lampung. Hal itu dijelaskan dalam pembukaan pedoman dasar DKL alinea 4 berikut:

“Para seniman bertanggung jawab menciptakan karya-karya yang bernilai dan bermakna bagi bangsa dan kemanusiaan. Sementara masyarakat merupakan pengamat, peminat, dan pendukung karya seni yang dalam interaksi Kreatif dengan khallayak luas menyentuh kepekaanya terhadap nilai-nilai dasar kehidupan dan kemanusiaan serta memberikan inspirasi dan gairah membangun.”

Secara jelas peran DKL dalam pengembangan kesenian di Lampung, tercantum dalam pedoman dasar DKL pada pasal 2 ayat 2 yang berbunyi Memberikan kontribusi pemikiran kesenian, kebijakan pembinaan dan pengembangan kesenian di Propinsi Lampung sebagai berikut :

1. Sebagai fasilitator dan katalisator kesenian di Propinsi Lampung.
2. Sebagai pelaksana pembinaan dan pengembangan Kesenian melalui :
  - a. Peningkatan aktifitas keseniaan;
  - b. Peningkatan kualitas keseniaan;
  - c. Pemberdayaan seniman dan Masyarakat.

Dewan Kesenian Lampung (DKL), sebagai lembaga yang memiliki konsentrasi pada kesenian memeiliki tugas untuk meningkatkan kualitas sumberdaya manusia, seniman dan karaya seninya, serta meningkatkan aktivitas dan produktivitas kegiatan seniman. (Koran Festival DKL,ed. Oktober 2004).

Strategi yang dipakai untuk mewujudkan harapan DKL ini yaitu dengan menyelenggarakan pelatihan dibidang sumberdaya manusia (SDM) serta manajemen melalui workshop, diskusi, pameran, pertunjukan dan pementasan karya kesenian. Secara keorganisasian, pembinaan kesenian di Lampung oleh DKL akan berhasil jika pengurus mampu menerapkan pedoman organisasi, sebagaimana yang diisyaratkan dalam pedoman dasar DKL. Sastrawan Lampung yang tergabung dalam DKL adalah sastrawan yang menjadi pengurus dalam organisasi DKL. Secara umum penjelasan mengenai siapa yang bisa dikatakan sebagai Sastrawan Lampung memiliki variasi pendapat.

Banyak pengertian yang melatari penjelasan mengenai sastrawan Lampung, menurut Karzi, sebagaimana yang dipublikasikan Cybersastra (14/03/2004), bahwa seperti yang sering ditulis oleh pengamat sastra di negeri ini, Lampung tidak akan kekurangan sastra dan sastrawan. Berbagai halaman budaya media lokal dan nasional, sering kali dihiasi dengan karya sastra dan nama sastrawan Lampung. Begitu juga beberapa pertemuan sastrawan dipenjuru tanah air rasanya kurang lazim jika tidak mengundang sastrawan Lampung. Dengan ukuran sederhana ini rasanya sulit mengatakan Lampung kurang subur dalam bidang sastra. Karya sastra dan sastrawan dari Lampung setiap tahun rasanya akan selalu bertambah.

Lebih jelasnya Karzi (Cybersastra 14/03/2004). meberikan pilihan akan keberadaan sastrawan Lampung sebagaiberikut:

“Namun perhatikan kegelisahan seorang Kuswinarto yang membagi sastrawan Lampung sebagai istilah dalam dua pengertian. Pertama, sastrawan Lampung adalah sastrawan yang menulis karya sastra dalam bahasa indonesia dan iya tinggal di Lampung. Kata lain sastrawan Lampung adalah sastrawan Indonesia yang tinggal di Lampung. Kedua, sasatrawan Lampung adalah sastrawan yang menulis karya sastra dalam bahasa lampung dan iya tidak harus berdomisili di Lampung.”

Dalam pandangan ini bahwa pengertian sastrawan Lampung mengalami variasi dan masih menjadi perdebatan, simak pandangan Karzi (Cybersastra 14/03/2004). Sebagaiberikut:

“lampung kaya akan sastrawan dan kehidupan sastra Lampung penuh gairah bisa (mungkin) benar jika sastrawan Lampung yang dimaksudkan adalah dalam pengertiannya yang pertama. Namun jika yang dimaksudkan pengertian yang kedua, maka sastrawan Lampung sangat sedikit. Kebanyakan sastrawan Lampung tidak menulis dalam bahasa Lampung. Sementara sastrawan Lampung yang sebenarnya yang jumlahnya semakin menipis karena usia dan pergeseran tradisi, masih saja berasik–asik dengan tradisi lisannya. Resiko kelisanan adalah lupa. Dalam kondisi ini sejauh sastra (berbahasa) Lampung tidak ditulis, maka jangan berharap sastar Lampung dapat berkembang.

Pandangan yang hampir sama terungkap dalam pendapat Kuswinarto(Cybersastra 28/05/03). Sebagaiberikut:

“Cuma, akankah sastra Lampung berjaya? Akankah terhadi hujan sastrawan Lampung di Bumi Rua Jurai? Sepertinya ini masih menjadi pekerjaan rumah yang berat bagi kita. Menurut catatan SIL International Indonesia Branch dalam buku Languages of Indonesia (2001), ada sekitar 3 juta penutur asli bahasa Lampung. Jumlah itu memang sudah kadaluarsa karena data diambil dari D. Walker (1976), Wurn dan Hatton

(1981), dan Gekisus (1985). Namun dari sini pun kita bisa mengatakan sastra (berbahasa) Lampung sebetulnya potensial berjaya hanya saja banyak—sedikitnya penutur bahasa Lampung memang bukan jaminan untuk berjayanya bahasa dan sastra Lampung.”

Hanya saja kesadaran adanya saling menghargai dan berkarya terungkap pada penjelasan Karzi (Cybersastra 14/03/2004) sebagai berikut:

“Sekarang perdebatanya apa yang harus ditulis sastrawan yang menggunakan bahasa Lampung sebagai bahan buku atau media Ekspresinya? Haruskah seorang sastrawan Lampung menuliskan tradisi, adat istiadat, kebudayaan, puisi, atau cerita yang sudah dihapal dengan baik oleh para seniman sastra didaerah? Kalau itu yang terjadi jelas sastrawan Lampung hanya melakukan reproduksi karya sastra tanpa kreativitas dan inovasi, semacam menuliskan sastra lisan dalam bentuk teks.”

Oleh sebab itu itu diperlukan peran DKL dalam pembinaan sastra dan kesenian di Lampung dengan meningkatkan kualitas sumberdaya manusia, seniman dan karaya seninya, serta meningkatkan aktivitas dan produktivitas kegiatan seniman. Dan seni budaya itu harus dikembangkan sesuai dengan kebutuhan masyarakat atau diklaborasi dengan keadaan sekitar sehingga sastra dan kesenian tetap lestari tidak termakan oleh modernisasi.

#### **H. Upaya Sastrawan Lampung Dalam Pengembangan Demokrasi Lokal**

Sastrawan memiliki tanggungjawab kesastrwanan, selain menghasilkan karya juga memiliki tanggungjawab untuk memperhatikan dinamika sosial, sebagaimana yang disinggung Aritonang (Haryanto,1985:256), bahwa sastrawan harus peduli dengan persoalan–persoalan yang bersifat tidak

terpenuhinya rasa keadilan. Jika sastrawan tidak mengindahkan realitas yang berada dilapangan maka sastrawan berada dalam keterasingan sendiri.

Bagi seorang seniman atau sastrawan, Sutrisno (1998) dalam pengantar Seni, Politik, Pemberontakan, memberikan gambaran ruang kreativitas, ada 3 syarat yang harus dimiliki sastrawan untuk melahirkan karya-karyanya, yaitu:

1. Kebebasan. Tanpa ada kebebasan mustahil muncul kreativitas, karena kreativitas adalah perombakan tatanan lama menuju tatanan baru yang lebih baik;
2. Adanya hubungan atau Komunikasi. Yaitu kemungkinan untuk melakukan tukar informasi dan pengalaman dengan pihak lain;
3. Keberanian. Keberanian adalah penentu akhir aktualitas, meskipun terdapat kebebasan peluang serta hubungan–hubungan kemampuan tanpa keberanian semuanya menjadi percuma.

Tanggungjawab penyadaran terhadap situasi sosial oleh seorang sastrawan disebutkan oleh Kartapati (Haryanto, 1985:2004) berikut:

“Maka pada hakikatnya sastra adalah konsientisasi, yakni penyadaran terhadap belenggu, akan tetapi bukan setiap karya yang mengandung nilai penyadaran adalah sastra, karena kalau begitu berarti baru sampai kepada esensi seni keindahan atau estetika, yang disebutkan diatas sebagai eksistensi seni, tak boleh diabaikan.”

Untuk melihat pandangan sastrawan Lampung terhadap dunia politik dan demokrasi, dapat ditelusuri pada pandangan Karzi (Cybersastra,08:2002) sebagaiberikut:

“Jika politik mengotori, sastra menyucinya. Ungkapan John F. Kennedy ini sedemikian terkenalnya, sehingga kemudian para sastrawan terlegitimasi kebersihannya, lalu orang-orang pun menganggap karya-karya sastra sebagai karya yang dapat menyuarakan kebebasan, hati nurani, dan nilai-nilai moralitas. Bacalah sastra agar mata hati dapat terasah dengan nilai-nilai kemanusiaan, sebab sastra yang baik dapat mengajak manusia kembali merenungi sebuah perjalanan kehidupan, tidak dengan kaca mata hitam-putih, salah benar, atau dosa-pahala, tetapi penuh dengan background sebab-akibat dan kelaziman toleransi.”

Lebih lanjut Karzi (Cybersastra, 2002:8) menjelaskansebagai berikut:

“Beda sastrawan dengan politikus adalah, jika politikus berjuang mendapatkan kekuasaan maka sastrawan bekerja untuk mengembangkan kehidupan yang lebih damai,harmonis dan penuh dengan pertimbangan-pertimbangan kemanusiaan, sebab sastra merupakan sisi kehidupan yang tertuang dalam bentuk tulisan. Sebagai pembaca tentu kita dapat membedakan mana karya sastra dan mana tulisan politik. Jelas beda cara menuliskannya berlainan jadi tak perlu khawatir pembaca akan mengira kebohongan-kebohongan sebagai bentuk karya sastra.”

sebagaimana pendapat Pye (Sudarsono,1982:211). Menjadi jelas bahwa sastrawan memiliki tanggungjawab terhadap persoalan-persoalan kemasyarakatan, politik, demokrasi dan pengembangan budaya karena sastrawan tidak terlepas dari lingkungan sosialnya. Dalam konteks pengembangan demokrasi lokal sastrawan memiliki peran pada tingkatan menjalankan dan menjelaskan pada masyarakat

Upaya satrawan Lampung dalam pengembangan demokrasi lokal melalui banyak cara selain merangkul tokoh adat dan agama yang berlainan dari masyarakat asli Lampung dan juga saling menghormati tidak membedakan suku, ras dan agama. Salah satu kata kiasan yang biasa dipakai sastrawan Lampung dan masyarakat Lampung dalam kehidupan sehari-hari berbunyi *Muhanjah Wewah Puduk* yang artinya dalam kehidupan sehari-hari duluanlah kita melakukan senyum kepada seseorang.

upaya lainnya yang dilakukan sastrawan Lampung dengan melakukan berbagai macam kegiatan yang dimaksudkan agar dapat merangkul masyarakat yang berbeda suku, ras dan agama sehingga mencegah terjadinya konflik, berikut beberapa kegiatan yang telah dilakukan Dewan Kesenian Lampung (DKL):

1. Cangget Barra di Pendopo pada tahun 2008;
2. LAF pada tahun pad tahun 2010;
3. Roadshow dan Pelangi Seni Budaya Lampung pada tahun 2015.

## **I. Kerangka Pikir**

Demokratisasi merupakan setting global untuk terciptanya sistem demokrasi yang menghargai pendapat dan menghargai satu dengan lainnya. Namun tidak banyak yang tahu ternyata demokrasi lokal juga memberikan kontribusi bagi perkembangan demokrasi universal. Dalam kenyataannya konsep

demokrasi universal ternyata melambung tinggi dan tidak dapat dilakukan dengan baik oleh manusianya. Artinya konsep demokrasi universal terlalu ideal dan sulit untuk dilaksanakan. Oleh sebab itu perlu dilihat sebagai sebuah tradisi apakah budaya lokal yang dianggap *parochial* dapat memberikan sumbangan demokrasi. Paling tidak budaya lokal dapat digabungkan dengan konsep demokrasi untuk negara transisi seperti Indonesia. Secara umum dapat dikatakan bahwa demokrasi lokal juga ada dan perlu dilestarikan.

Untuk konteks budaya Lampung, ternyata konsepsi demokrasi ditemui dan dijelaskan dalam sistem pemerintahan lambang rumah adat dan sistem persaudaraan, kekerabatan, serta sistem mendapatkan kekuasaan sebagaimana adat pepadun dan penyelesaian masalah dengan musyawarah mufakat. Dengan menggunakan budaya lokal Piil Pesinggiri, budaya Lampung juga memberikan kontribusi agar setiap orang ikut serta menolong orang lain dan menyelesaikan masalah dengan musyawarah mufakat.

Sastrawan yang tinggal di Lampung, sebagai salah satu agensi melaksanakan cita-cita demokrasi, apakah memikirkan proses-proses demokrasi dalam setiap kegiatan dan pembuatan program diantara kelompok/organisasi masing-masing. Terutama dalam kegiatan yang dapat mendorong bertahannya atau terciptanya demokrasi lokal tradisi Lampung.



Gambar 1. Bagan kerangka pikir

### **III. METODE PENELITIAN**

#### **A. Tipe Penelitian**

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah tipe penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif, dengan mengacu kepada definisi yang diberikan oleh Bog dan Taylor yaitu prosedur penelitian yang akan menghasilkan data deskripsi berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Dalam penelitian ini implementasi metode kualitatif terutama dilakukan melalui wawancara mendalam.

Selama proses penelitian observasi terhadap responden tidak hanya pada saat wawancara tapi pada setiap kesempatan bertemu di DKL, peneliti dapat melakukan penelitian partisipatif karena kebetulan peneliti seringkali menjadi kepanitiaan dalam kegiatan di DKL. Namun demikian penelitian ini berusaha untuk mengungkap informasi sebanyak dan subjektif mungkin melalui pertanyaan-pertanyaan yang disusun melalui daftar wawancara terstruktur dan dokumen yang ada. Selain itu pengumpulan data juga menggunakan teknik dokumentasi. Hal ini dilakukan untuk melihat kembali tingkat validitas data serta untuk membantu menganalisis data dari dokumentasi yang ada.

Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif, yang dimaksudkan untuk mengeksplorasi dan mengklarifikasi mengenai suatu fenomena atau kenyataan sosial, politik yang dikaitkan dengan fenomena sastra terlahir, dengan jelas menggambarkan sejumlah variabel yang berkenaan dengan masalah dan unit yang diteliti (faisal Sanapia, 1989:20). Pada prinsipnya penelitian deskriptif adalah cara yang digunakan untuk menggambarkan, menjelaskan dan menjawab permasalahan lapangan dengan teori-teori, konsep-konsep dan data hasil penelitian lapangan (Hadari Nawawi, 1992:64).

## **B. Fokus Penelitian**

Miles dan Huberman (1992:30) menjelaskan bahwa memfokuskan dan membatasi pengumpulan data dapat dianggap sebagai bagian dari reduksi data yang sebelumnya sudah diantisipasi. Dalam penelitian kualitatif, fokus penelitian sangat penting artinya penentuan fokus dalam suatu penelitian setidaknya memiliki dua tujuan.

*Pertama*, penetapan fokus dapat membatasi studi yang juga berarti bahwa adanya fokus penentuan tempat penelitian menjadi lebih layak. *Kedua*, penentuan fokus secara efektif dapat dijadikan sebagai alat untuk menyaring informasi yang masuk. Sebab harus diperhatikan bahwa ketika lapangan akan ditemui banyak data yang menarik, namun jika dipandang tidak relevan data itu harus dihiraukan. Namun demikian dalam penelitian kualitatif fokus

penelitian tidaklah bersifat permanen melainkan dapat berubah sebab dengan adanya perubahan terhadap fokus penelitian dapat berarti bahwa penelitian yang dilakukan jauh lebih dapat dipahami dan lebih meningkat.

Dalam penelitian ini, fokus penelitian diarahkan pada upaya Sastrawan yang menjadi pengurus DKL dalam proses pengembangan demokrasi lokal yang dilihat dari:

1. Upaya-upaya apa saja yang dilakukan sastrawan Lampung yang tergabung dalam Dewan Kesenian Lampung dalam upaya pengembangan demokrasi lokal baik secara pribadi, maupun dalam struktur organisasi.

### **C. Lokasi Penelitian**

Penelitian ini dilakukan di dalam lingkungan Dewan Kesenian Lampung, fokus utama pada anggota Dewan Kesenian Lampung komite sastra pada periode 2015-2019.

### **D. Jenis Data**

Menurut Sugiyono (2012:225), sumber data dikelompokkan menjadi dua, yakni sumber data primer dan sumber data sekunder:

#### **1. Data Primer**

Data primer yang digunakan adalah berasal dari hasil wawancara. Sumber data tertulis atau direkam. Wawancara telah dilakukan kepada informan

yang telah ditentukan dengan menggunakan panduan wawancara. Teknik pemilihan orang yang akan diwawancarai dilakukan secara *purposive*. Alasan pemakaian teknik *purposive* disebabkan oleh bentuk dan ciri penelitian ini yaitu untuk mendapatkan informasi-informasi yang sesuai dengan tujuan dari pelaksanaan penelitian ini.

## 2. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari sumber-sumber yang ada. Data sekunder ini digunakan sebagai pendukung guna mencari fakta-fakta yang sebenarnya. Data sekunder juga diperlukan untuk melengkapi informasi dalam rangka mencocokkan data yang diperoleh. Sumber data sekunder yang digunakan antara lain berupa berita surat kabar, website, dokumen-dokumen, artikel, jurnal, dan referensi-referensi yang menjadi panduan sastrawan yang menjadi anggota pengurus DKL dalam upaya pengembangan demokrasi lokal

## E. Teknik Penentuan Informan

Informan pada sebuah penelitian, dapat diartikan sebagai orang yang dimanfaatkan untuk membarikan informasi tentang situasi dan kondisi latar penelitian. Sehingga, informan tersebut harus mempunyai banyak pengalaman tentang latar penelitian dan harus sukarela menjadi anggota tim penelitian walaupun hanya bersifat informal (Moelong, 2014:132). Maka,

guna memenuhi kebutuhan informasi pada penelitian ini, informan yang telah penulis wawancarai adalah sebagai berikut:

Berdasarkan definisi di atas, maka informan yang akan diwawancarai pada penelitian ini yakni:

1. Bagus S Pribadi (Sekretaris Umum)
2. Ari Pahala (Ketua Komite Sastra)
3. Udo Z Karzi (Ketua Komite Sastra)
4. Cristian Heru (Anggota Komite Sastra)
5. Fitri Yani (Anggota Komite Sastra)

#### **F. Teknik Pengumpulan Data**

Untuk memperoleh data yang benar dan akurat sehingga mampu menjawab permasalahan penelitian. Maka teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Wawancara Mendalam (*in-depth interview*)

Secara sederhana wawancara diartikan sebagai alat pengumpulan data dengan menggunakan tanya jawab antara pencari informasi dan sumber informasi. Seperti diungkapkan Hadari Nawawi (2001:111) yaitu:

“wawancara adalah usaha mengumpulkan informasi dengan mengajukan sejumlah pertanyaan lisan, untuk menjawab secara lisan pula. Ciri utama dari wawancara adalah langsung dengan tatap muka (*face to face relationship*) antara sipencari informasi (*interview/information hunter*) dengan sumber informasi (*interviewee*).”

## 2. Dokumentasi

Menurut Hadari Nawawi (2001:111) dokumen yang berupa tulisan ataupun film bagi peneliti dapat digunakan untuk diproses (melalui pencatatan, pengetikan, atau alat tulis), tetapi kualitatif tetap menggunakan kata-kata, yang biasanya disusun ke dalam teks yang diperluas. Teknik dokumentasi pada penelitian ini dengan cara mengumpulkan data melalui peninggalan tertulis. Terutama berupa surat kabar, website, arsip-arsip yang berhubungan dengan masalah penelitian

### **G. Teknik Pengolahan Data**

Setelah data diperoleh dari lapangan terkumpul maka tahap selanjutnya adalah mengolah data tersebut. Adapun teknik yang digunakan dalam pengolahan data sebagaimana yang disebutkan Lexy J. Moleong (2006:38) dalam bukunya Metode Penelitian Kualitatif adalah:

#### 1. Editing

Yaitu teknik mengolah data dengan cara meneliti kembali data yang telah diperoleh melalui wawancara mendalam, observasi maupun dokumentasi untuk menghindari kekeliruan dan kesalahan. Tahap editing yang dilakukan oleh peneliti dalam penelitian ini menyajikan hasil wawancara, yakni berupa kalimat-kalimat yang kurang baku disajikan dengan

menggunakan kalimat baku dan bahasa yang mudah dipahami, sehingga dapat dimengerti oleh pembaca.

## 2. Interpretasi

Interpretasi merupakan upaya untuk memperoleh arti dan makna yang lebih mendalam dan luas terhadap hasil penelitian yang sedang dilakukan. Pembahasan hasil penelitian dilakukan dengan cara meninjau hasil penelitian secara kritis dengan teori yang relevan dan informasi akurat yang diperoleh di lapangan

## H. Pengecekan Kebenaran Data

Dalam penelitian ini pengecekan kebenaran terhadap data/informasi yang dikumpulkan selama proses penelitian, peneliti lakukan melalui pengecekan terhadap data/informasi yang tidak jelas dan meragukan yang disampaikan oleh responden dalam wawancara yang telah tersusun kedalam transkrip wawancara. Langkah yang sama juga penulis lakukan terhadap interpretasi hasil wawancara yang tersusun dalam deskripsi program.

## I. Teknik Analisis dan Pengolahan Data

Model analisis data yang digunakan dalam penelitian ini mengacu kepada model interaktif yang dikembangkan oleh Mile dan Huberman (1992:15-20) dengan langkah–langkah sebagai berikut:

### 1. Reduksi Data

Yaitu sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan yang tertulis di lapangan. Reduksi data yang dilakukan peneliti dalam penelitian ini adalah analisa yang menajam, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu dan mengorganisasi data sehingga kesimpulan akhirnya dapat ditarik dan diverifikasi.

### 2. Penyajian Data (Display Data)

Penyajian-penyajian data yang lebih baik merupakan suatu cara yang utama bagi analisis kualitatif yang valid. Penyajian yang paling sering digunakan pada data kualitatif adalah bentuk teks naratif, berbagai jenis matrik, grafik dan bagan. Semuanya dirancang guna menggabungkan informasi yang tersusun dalam bentuk padu dan mudah diraih. Dalam penelitian ini penyajian data yang digunakan adalah bentuk teks naratif yang disertai bagan dan tabel yang isinya berkaitan dengan penelitian ini.

### 3. Penarikan Kesimpulan (verifikasi)

Berdasarkan pemulaan pengumpulan data, penganalisis kualitatif mulai mencari arti berde-a-beda, mencatat keteraturan, pola-pola kejelasan, konfigurasi-konfigurasi yang mungkin, alur sebab-akibat, dan proposisi. Penelitian ini yang berkompeten akan menangani kesimpulan-kesimpulan

itu dengan longgar, tetap terbuka, dan skeptis, tetapi kesimpulan sudah disediakan, mula-mula belum jelas, kemudian lebih rinci dan mengakar dengan kokoh. Dan kesimpulan akhir muncul sampai pengumpulan data berakhir, tergantung pada kesimpulan-kesimpulan catatan lapangan, pengodeannya, penyimpanan, metode pencairan ulang yang digunakan dan kecakapan peneliti.

**Tabel 1: Kisi-kisi Wawancara**

| no | Indikator      | Sub indikator                                                                                            | Sumber informan                                       |
|----|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
|    |                |                                                                                                          | Langsung                                              |
| 1  | Pesenggiri     | 1. Kebebasan dan kedaulatan berperilaku<br>2. Menjamin tegaknya keadilan                                 | Wawancara kepada komite sastra Dewan Kesenian Lampung |
| 2  | Nemui Nyimah   | 1. Pluralisme<br>2. Toleransi                                                                            | Wawancara kepada komite sastra Dewan Kesenian Lampung |
| 3  | Nengah Nyappur | 1. Konsensus dan mufakat<br>2. Menyelenggarakan pergantian pemimpin secara teratur                       | Wawancara kepada komite sastra Dewan Kesenian Lampung |
| 4  | Sakai Sambayan | 1. Pembatasan ke-kerasan dalam proses demokrasi<br>2. Terselenggaranya perubahan masyarakat secara damai | Wawancara kepada komite sastra Dewan Kesenian Lampung |

Sumber : Data Primer Penelitian

## **IV. GAMBARAN UMUM**

### **A. Gambaran Umum Obyek Penelitian**

#### **1. Sejarah Terbentuknya Dan Perkembangan Dewan Kesenian Lampung**

Pembentukan Dewan Kesenian Lampung melalui proses yang panjang, para pendiri seperti Iwan Jafar, Isbedi Setiawan, Syaiful Irba Tanpaka, Hermansyah, Gunarno, A.M Zulkarnain berkumpul di rumah seniman Bachtiar Amran untuk membicarakan pentingnya pendirian DKL untuk Provinsi Lampung. Keenam pendiri tersebut membuat wacana dengan tulisan perlunya pendirian DKL di tanah Lampung.

Akan tetapi sejarah terbentuknya Dewan Kesenian Lampung (DKL) bermula dengan dibentuknya Pengurus pentas Kesenian Daerah Lampung sebagai organisasi yang berwenang melakukan kegiatan pentas Kesenian di Daerah Lampung. Pembentukan Pengurus Pentas Kesenian Daerah Lampung tersebut untuk mengakomodir segenap potensi kesenian di Lampung sesuai dengan Intruksi Menteri Dalam Negeri No. 5-A Tahun 1993. Pembentukan Pentas Kesenian Daerah Lampung tersebut bertujuan sebagai katalisator segenap potensi kesenian daerah Lampung sedangkan organisasi dibawahnya

yaitu Dewan Kesenian Lampung (DKL) yang paling banyak diberi porsi untuk menyelenggarakan kegiatan seputar kesenian di daerah Lampung. Awalnya kepengurusan di DKL dipimpin oleh pemerintah dan para pejabat saja namun atas usulan seniman yang tergabung dalam pendirian DKL akhirnya DKL diserahkan pada seniman-seniman yang telah mewacanakan DKL sejak lama.

Berikut pengurus pertama DKL (periode 1993-1996) yang disahkan oleh Gubernur Provinsi Lampung No G/423/B.III/HK/1993 tertanggal 17 September 1993:

|                   |                                                                        |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------|
| Ketua Umum        | : Indra Bangsawan                                                      |
| Ketua Harian      | : Iwan Nurdaya Djafar                                                  |
| Wakil-wakil Ketua | : I Goen Gunarno<br>Sugandhi Putra<br>Djuwita Novrida<br>Ganti Winarno |
| Sekretari         | : Syaiful Irba Tanpaka                                                 |
| Sekretaris I      | : Titik Nurhayati                                                      |
| Sekretaris II     | : Bandarsyah                                                           |
| Bendahar I        | : AM Zulkarnain                                                        |
| Bendahara II      | : Deasy Mahendrawati                                                   |

Komite-Komite :

|                  |                                       |
|------------------|---------------------------------------|
| Komite Sastra    | : Isbedy Stiawan<br>Kahfi Nazaruddin  |
| Komite Teater    | : Pramudya Muchtar<br>Ucok Hutasuhut  |
| Komite Seni Rupa | : Dana E Rahmat<br>Bambang Suroboyono |
| Komite Seni Tari | : Hari Jayaningrat<br>Maysari BM      |

|                         |                                  |
|-------------------------|----------------------------------|
| Komite Musik            | : Bagus S. Pribadi<br>Agus Salim |
| Komite Film             | : Masprill Aris<br>Idris KS      |
| Komite Seni Tradisional | : Hafizi Hasan<br>Azhari Kadir   |
| Komite Litbang          | : Eddy Suherly<br>: Panji Utama  |

Dan korwil-korwil, seperti Lampung Utara, Lampung Barat, Lampung Tengah dan Lampung Selatan. Perkembangan Dewan Kesenian Lampung selanjutnya terpisahkan dari pengurus pentas kesenian daerah Lampung yang berdiri sendiri dan melakukan kegiatan sendiri sesuai dengan keinginan para pengurus. Hal itu dikuatkan dengan terjadinya musyawarah dalam pergantian pengurus di DKL.

Pada periode kedua, DKL mengalami perubahan dari segi struktur keorganisasiannya. Setelah 3 tahun melaksanakan kepengurusan, pengurus lama dan anggota musyawarah seniman Lampung berpandangan perlu memperbaiki struktur organisasi dengan menepatkan pengurus sekaligus anggota. Misalnya ketua harian sekaligus menjadi anggota komite, perbaikan ini dilakukan dalam rangka efisiensi kepengurusan.

Dari segi kepengurusan DKL masih didominasi wajah-wajah lama terutama pada pengurus teras, seperti ketua umum, ketua harian sekretaris dan bendahara, peresmian pengurus periode 1996-2001 disahkan oleh SK

Gubernur Lampung NO. G/09/DKL/HK/1996. Secara rinci dibawah ini pengurus DKL periode 1996-2001:

|               |                        |
|---------------|------------------------|
| Ketua Umum    | : Indra Bangsawan      |
| Ketua Harian  | : Iwan Nurdaya Djafar  |
| Wakil Ketua   | : I Goen Gunarno       |
|               | : Sugandhi Putra       |
|               | : Djuwita Novrida      |
|               | : Ganti Winarno        |
| Sekretaris    | : Syaiful Irba Tanpaka |
| Sekretaris I  | : Hermansyah GA        |
| Sekretaris II | : Bandarsyah           |
| Bendahara I   | : AM Zulkarnain        |
| Bendahara II  | : Deasy Mahendrawati   |

Komite-Komite:

|               |                        |
|---------------|------------------------|
| Komite Sastra | : Isbedy Stiawan Zs    |
|               | : Kahfi Nazaruddin     |
|               | : Sugandi Putra        |
|               | : Iwan Nurdaya Jafar   |
|               | : Syaiful Irba Tanpaka |

|               |                    |
|---------------|--------------------|
| Komite Teater | : Pramudya Muchtar |
|               | : Ucok Hutasuhut   |
|               | : Bandarsyah       |

|                  |                    |
|------------------|--------------------|
| Komite Seni Rupa | : Dana E Rahmat    |
|                  | : Bambang Suroboyo |
|                  | : Ganti Winarno    |

|                  |                      |
|------------------|----------------------|
| Komite Seni Tari | : Hari Jayaningrat   |
|                  | : Maysari BM         |
|                  | : Titik Nurhayati    |
|                  | : Deasy Mahendrawati |

|              |                    |
|--------------|--------------------|
| Komite Musik | : Bagus S. Pribadi |
|              | : Agus Salim       |
|              | : AM zulkarnian    |

|             |                  |
|-------------|------------------|
| Komite Film | : I Goenarno     |
|             | : Maspril Aris   |
|             | : Idris KS       |
|             | : Juwita Novrida |

Komite Seni Tradisional : Hafizi Hasan  
: Azhari Kadir

Komite Litbang : Eddy Hasan  
: Panji Utama

Pergantian kepengurusan DKL dua periode Awal dari dibentuknya DKL hingga periode terakhir tidak banyak mengalami perubahan hanya baru mengalami perubahan ditahun 2015-2019 dimana masa jabatan yang awalnya 3 tahun menjadi 4 tahun masa jabatan ini dilakukan untuk mengoptimalkan program-program yang ingin dilakukan oleh pengurus DKL karena 3 tahun masa jabatan dianggap kurang untuk dapat merealisasikan program program yang telah direncanakan.

Peresmian Pengurus DKL Periode 2015-2019 disahkan oleh SK Gubernur Lampung NO. G/393/III.01/HK/2015. Berikut secara rincian kepengurusan DKL periode 2015-2019:

|                  |                        |
|------------------|------------------------|
| Ketua Umum       | : Yustin Ridho Ficardo |
| Ketua Harian     | : Heri Suliyanto       |
| Sekretaris Umum  | : Bagus S Pribadi      |
| Wakil Sekum      | : Dana E Rahmat        |
| Bendahara        | : Mungliana            |
| Wakil Bendahara  | : Diona Katharina      |
| Ketua Bidang I   | : Hari Jayaningrat     |
| Ketua Bidang II  | : Agus Salim           |
| Ketua Bidang III | : Bambang Suroboy      |

Komite-Komite:

Komite Sastra : Ari Pahala  
: Christian Heru

|                         |                                                                                      |
|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
|                         | : Udo Z Karzi<br>: Fitri Yani                                                        |
| Komite Teater           | : Alexander Gebe<br>: A.Jusmar<br>: Laras Utami<br>: Edi Samudra Kertagama           |
| Komite Seni Rupa        | : Yen Junaidi<br>: Lila Ayu Arini<br>: Yulis Benardi<br>: Agus Suprayoga             |
| Komite Seni Tari        | : A.Barden Moegni<br>: Juwita Novrida<br>: Agus Gunawn<br>: Diantori<br>: Susy Yanti |
| Komite Musik            | : Naning Widayati<br>: Rikky Oktario<br>: Hamonangan Naibaho<br>: Belly              |
| Komite Film             | : Firdaus Rusmil<br>: Dede Wijaya<br>: Budi S Putra<br>: I Gede Setyana              |
| Komite Seni Tradisional | : Syafril Yamin<br>: Sutan Purnama<br>: Edo Permana<br>: Dewi Sopia                  |
| Komite Litbang          | : Sapto Wibowo<br>: Cakrawala Umar                                                   |

## **2. Tujuan Dibentuknya DKL**

Tujuan dibentuknya DKL adalah sebagai mitra pemerintah, masyarakat dan seniman dalam rangka memfasilitasi potensi kesenian yang ada di Provinsi Lampung. Sehingga seniman Lampung bisa berekspresi lebih bebas dan bertanggungjawab dalam berkarya. Oleh karena itu DKL memiliki fokus pada peningkatan potensi kesenian di Lampung, memfasilitasi berbagai kegiatan masyarakat untuk berkesenian, memfasilitasi seniman untuk berkaraya dan juga sebagai katalisator. Sampai saat ini tujuan DKL masih digunakan sebagai fungsi DKL.

Pada masa periode 2015-2019 ini Dewan Kesenian Lampung (DKL) lebih memfokuskan diri sebagai mitra pemerintah yang sesungguhnya merupakan narasumber utama untuk membangun peta seni budaya di Daerah. Pada masa ini DKL berupaya melayarkan perahunya seiring dengan tuntutan reformasi, artinya sesuai dengan tuntutan-tuntutan perubahan dan pembaruan yang demokratis dengan merencanakan program kerja berupa konsolidasi organisasi, melakukan koordinasi dengan pihak-pihak terkait serta bersikap akomodatif dalam menyelenggarakan aktivitas kegiatan dengan menyentuh berbagai lapisan masyarakat dan berbagai kalangan seniman.

Kegiatan yang dilaksanakan untuk jangka pendek DKL periode 2015-2019 lebih memprioritaskan pada hal-hal yang dapat meningkatkan apreasi masyarakat terhadap kesenian, meningkatkan kualitas sumber daya manusia

seniman dan karya seninya serta meningkatkan aktivitas dan produktivitas kegiatan seniman. Strategi yang digunakan untuk mewujudkan rencana DKL ini dilakukan dengan menyelenggarakan pelatihan dibidang sumber daya manusia (SDM) serta manajemen melalui workshop, diskusi, pameran, pertunjukan dan pemetasan karya kesenian.

### **3. Tujuan Program Kerja DKL**

Secara umum tujuan program kerja DKL tidak terlepas dari fungsi dinamisator, Fasilitator dan katalisator yang mempertemukan masyarakat dengan kesenian, menurut Ari Pahala semua tujuan program banyak yang melibatkan masyarakat agar masyarakat dapat mengetahui seni dan sastra yang ada di Lampung. Sebab fungsi DKL sudah jelas melakukan katalisator antara masyarakat dengan kesenian. Hal yang sama juga dijelaskan Udo Z Karzi, menurutnya secara umum tujuan program yang dilaksanakan DKL merupakan perogram yang mampu menjadi katalisator, dinamisator dan fasilitator antara masyarakat dengan seni, baik itu seni kontemporer, maupu seni tradisi.

Untuk melihat sinkronisasi penjelasan beberapa responden mengenai tujuan DKL dalam hal ini dapat dilihat pada tabel program kerja yang disusun pengurus DKL periode 2015-2019 sebagai berikut:

**Tabel 2: Program Kerja DKL Tahun 2015**

| <b>No</b> | <b>Program</b>                       | <b>Tujuan</b>                                                                         |
|-----------|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 1         | Diskusi Seni                         | Mengembangkan nilai-nilai kesenian di Lampung da mencari akar masalah seni di Lampung |
| 2         | Rapat Kordinasi                      | Silaturahmi pengurus baru                                                             |
| 3         | Workshop cerpen untuk pelajar        | Membina cerpenis muda                                                                 |
| 4         | Pentas da pameran benda-benda teater | Mensosialisasikan proses berteater                                                    |
| 5         | Pameran Rupa-Rupa ekspresi           | Mengenalka karya pelukis Lampung                                                      |
| 6         | Festival Seni Budaya                 | Menjaga da melestarikan budaya Lampung agar lebih dikenal masyarakat.                 |

Sumber : Data Primer Penelitian

Tujuan program kerja yang beragam dapat dilihat dari program-program tahun 2015 diatas, secara garis besar tujuan program telah mengindikasikan adanya usaha DKL untuk melakukan fasilitasi dan motivasi terhadap kesenian di Lampung. Terdapat program kerja yang memiliki hubungan dengan sastra seperti diskusi yang bertemakan sastra dan workshop cerpen.

Selain itu DKL juga memperhatikan pengembangan dan pembinaan seni sastra di Lampung. Berdasarkan program kerja DKL tahun 2015 dari program-program yang telah dilaksanakan maka tujuan DKL untuk melestarikan demokrasi lokal Lampung dapat terrealisasikan sehingga demokrasi lokal Lampung tetap lestari.

**Tabel 3: program kerja DKL tahun 2016**

| No | Program Kerja                                          | Tujuan                                            |
|----|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| 1  | Diskusi Seni                                           | Mengembangkan nilai-nilai kesenian di Lampung     |
| 2  | Lomba menulis Cerpen berbahasa Lampung tingkat pelajar | Untuk melestarikan dan mengenalkan budaya Lampung |
| 3  | Workshop Film                                          | Agar mengetahui seluk beluk pembuatan film        |
| 4  | Penayangan film indie                                  | Mencari format ideal perfilman                    |
| 5  | Pameran seni rupa                                      | Menjaga intensitas karya seni                     |

Sumber : Data Primer Penelitian

program-program kerja DKL tahun 2016 sebagian besar belum terrealisasi hanya satu program yang telah terrealisasi yaitu lomba menulis cerpen berbahasa Lampung tingkat pelajar dengan tujuan untuk melestarikan dan mengenalkan budaya Lampung kepada generasi muda khususnya pelajar. Belum terealisasinya beberapa program yang telah direncanakan dikarenakan anggaran kerja tahun 2016 baru turun Bulan April sehingga baru satu program yang terealisasikan, sebagaimana yang diungkapkan Bagus S Pribadi sebagai berikut:

“anggaran pelaksanaan program-program kerja DKL tahun 2016 akan direalisasikan pada bulan April (Bagus S Pribadi wawancara pada Kamis, 12 April 2016)”

## B. Gambaran Umum Informan

### 1. Usia Informan

Usia rata-rata Informan tergolong cukup berpengalaman untuk menjadi pengurus Dewan Kesenian Lampung 2015-2019, dalam penelitian ini usia Informan cukup beragam dimana Ari Pahala sebagai ketua komite sastra berusia 41 tahun, Udo Z Karzi sebagai anggota komite sastra berusia 46 tahun, Fitri Yani sebagai anggota komite sastra berusia 28, Cristian Heru sebagai anggota komite sastra berusia 32, Bagus S Pribadi sebagai sekertaris umum berusia 52 tahun

**Tabel 4: Komposisi Usia Informan Ketika Masuk Menjadi Pengurus DKL Hingga Saat Ini**

| <b>Nama</b>     | <b>Usia masuk DKL</b> | <b>Usia Sekarang</b> |
|-----------------|-----------------------|----------------------|
| Bagus S Pribadi | 29                    | 52                   |
| Ari Pahala      | 26                    | 41                   |
| Udo Z Karzi     | 35                    | 46                   |
| Fitriani        | 26                    | 28                   |
| Cristian Heru   | 25                    | 32                   |

Sumber : Data Primer Penelitian

Secara umum dapat diketahui Bagus S Pribadi telah 23 tahun berkecimpung di Dewan Kesenian Lampung, Ari Pahala telah 15 tahun berkecimpung di Dewan Kesenian Lampung, Udo Z Karzi telah 11 tahun berkecimpung di Dewan Kesenian Lampung Cristian Heru telah 7 tahun dan Fitri Yani baru

1Tahun berkecimpung di Dewan Kesenian Lampung, terdapat beberapa hal yang menarik bahwa dari pengurus DKL Lampung periode 2015-2019 umumnya mereka memiliki waktu yang cukup relatif panjang untuk masuk DKL sebelum akhirnya menjadi pengurus DKL.

## 2. Latar Belakang Pekerjaan Informan

Latar belakang pekerjaan Informan sangatlah beragam dimana Bagus S Pribadi bekerja sebagai seniman, Ari Pahala bekerja sebagai sastrwan, Udo Z Karzi bekerja sebagai sastrwan, Cristian Heru bekerja sebagai sastrawan dan Fitri Yani bekerja sebagai guru. Latar belakang pekerjaan yang beragam ini memungkinkan terjadinya perbedaan pendapat dalam organisasi, karena pengalaman yang berbeda, namun dengan perbedaan pekerjaan ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas kerja yang baik dan menuju terciptanya nilai-nilai demokrasi.

**Tabel 5: Komposisi Pekerjaan Informan**

| <b>Nama</b>     | <b>Jabatan di DKL</b> | <b>Pekerjaan</b> |
|-----------------|-----------------------|------------------|
| Bagus S Pribadi | Sekretaris Umum       | Seniman          |
| Ari Pahala      | Ketua Komite Sastra   | Sastrawan        |
| Udo Z Karzi     | Anggota Komite Sastra | Sastrawan        |
| Fitri Yani      | Anggota Komite Sastra | Guru             |
| Cristian Heru   | Anggota Komite Sastra | Sastrawan        |

Sumber : Data Primer Penelitian

### 3. Tingkat Pendidikan Informan

Dari kelima Informan yang terlibat dalam penelitian ini, tingkat pendidikan yang mereka capai cukup tinggi dimana semuanya menyelesaikan pendidikan minimal S.I. Tingginya capaian tingkat pendidikan sastrawan ini sangat penting artinya dalam mengambil keputusan, menyampaikan pendapat, berkomunikasi sesama pengurus dan membangun organisasi kearah yang lebih baik serta mampu menentukan program kerja yang bertujuan mengembangkan demokrasi lokal di Lampung.

**Tabel 6: Tingkat Pendidikan Informan**

| <b>Nama</b>     | <b>Jabatan di DKL</b> | <b>Pendidikan</b> |
|-----------------|-----------------------|-------------------|
| Bagus S Pribadi | Sekretaris Umum       | S.I               |
| Ari Pahala      | Ketua Komite Sastra   | S.I               |
| Udo Z Karzi     | Anggota Komite Sastra | S.I               |
| Futriani        | Anggota Komite Sastra | S.I               |
| Cristian Heru   | Anggota Komite Sastra | S.I               |

Sumber : Data Primer Penelitian

Bekal pendidikan juga sangat penting artinya bagi sastrawan da menjalankan tugas organisasi sehari-hari sebagai pendorong terciptanya demokrasi, pengetahuan akademis yang diperoleh membantu dalam menyelesaikan berbagai macam persoalan dalam organisasi serta membantu menjembatani organisasi dengan masyarakat.

## **VI. SIMPULAN DAN SARAN**

### **A. Simpulan**

1. Berdasarkan hasil dari penelitian yang dilakukan dalam kaitannya dengan Upaya Pengembangan Demokrasi Lokal Studi Pada Sastrawan Pengurus Dewan Kesenia Lampung Periode 2015-2019, maka penulis dapat menyimpulkan bahwa upaya sastrawan dalam pengembangan demokrasi lokal belum mencerminkan nilai-nilai Piil Pesenggiri yaitu: Pesenggiri, Nemui Nyimah, Nengah Nyampur dan Sakai Sambayan yang menjadi prinsip demokrasi lokal Lampung. Terlebih, dari dalam tubuh organisasi, prinsip demokrasi juga belum terimplementasi dengan baik.
2. Selain itu, terdapat minimnya upaya pengembangan demokrasi lokal yang dilakukan sastrawan yang menjadi pengurus Dewan Kesenian Lampung. Implementasi tersebut dilakukan dengan cara membuat karya sastra yang memiliki nilai-nilai demokratis dan ada juga yang mengupayakan pengembangan demokrasi lokal melalui program kerja dalam organisasi.

## **B. Saran**

Berdasarkan penelitian dan uraian diatas dengan segala keterbatasan pengetahuan penulis mencoba untuk memberikan saran yaitu:

1. Sesuai dengan hasil penelitian maka sebaiknya sastrawan Dewan Kesenian Lampung lebih menggunakan prinsip demokrasi lokal Lampung yakni Piil Pesenggihi dalam penyelenggaraan organisasi dan pembuatan karya sastra. Selain itu dengan berkarya yang memiliki fokus pada nilai demokrasi lokal dan melaksanakan organisasi dengan mempertimbangkan prinsip demokrasi lokal merupakan salah satu cara dalam upaya pengembangan demokrasi lokal yang sedang stagnan karena terjadi berbagai kekeliruan pada implementasinya seperti yang terjadi saat ini.
2. Dewan Kesenian Lampung harus lebih aktif dalam pengembangan demokrasi lokal dengan cara membuat berbagai macam kegiatan bagi masyarakat maupun seniman dan sastrawan yang mencerminkan nilai-nilai demokrasi lokal sehingga demokrasi lokal Lampung mampu bertahan dan tidak terkikis oleh modernisasi.

## DAFTAR PUSTAKA

- A.Dhal, 1985, *Dilema Demokrasi Pluralis*, Rajawali Press, Jakarta
- Ajidarma, Seno Gumira, 1997, *KeTika Jurnalisme Dibungkam sastra Harus Bicara*, Yayasan bentang Budaya
- Aminuddin,dkk,2002, *Analisis Wacana, Dari Lingusitik Sampai Dekonstruksi*, Pusat Studi kebudayaan Universitas Gajah Mada dan Penerbit Kanal
- Arikunto,Suharsimi. 1998. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Rineka Cipta Karya, Jakarta
- Asmuni. Khaidir dan Anshori Jausal, 2002, *Komunitas Gelembung Sabun*, Media Pressindo
- Budiarjo, Mariam (ed), 1982, *Masalah Kenegaraan*, PT Gramedia, Jakarta
- Camus, Albert,dkk,1998, *Seni, Politik dan Pemberontakan*, Yayasan Bentang Budaya, Yogyakarta
- Estan, Mursal, 1999, *Desentralisasi Kebudayaan*, Angkasa Bandung
- Haryanto, Ariel, 1985, *Perdebatan Sastra Kontekstual*, CV. Rajawali, Jakarta
- Hadikusuma, Hilman, Prof.dkk, 1996, *Adat-Istiadat Daerah Lampug*, Kanwil Depdikbud Propinsi Lampung
- Hadikusuma, Hilman, Prof.dkk, 1996, *Masyarakat dan Adat Budaya Lampung*, Mandar Maju

Hoogerwerf.1981, *Politikologi*, Erlangga, Jakarta

Huntington, Samuel P. 1983. *Tertib Politik di Masyarakat yang Sedang Berkembang*.  
Rajawali Press, Jakarta

Jabrohim. 2002. *Metodologi Penelitian Sastra*. Hanindita, Yogyakarta

Latif, Yudi, dan Idi Subandy Ibrahim.1996. *Bahasa dan kekuasaan, Politik Wacana di Panggung Orde Baru*, Mizan, Bandung

LP3ES, 1986. *Demokrasi dan Proses Politik*, Jakarta

Pradopo, Rahmat Djoko. 1995. *Beberapa Teori Sastra, Metode Kritik, dan Penerapannya*,  
Pustaka Pelajar, Yogyakarta

Soemarjo, Selo. 1984. *Budaya Sastra*, Rajawali Press, Jakarta

Soekito, Wiratmo. 1985. *Kesusastraan dan kekuasaan*, yayasan Arus, Jakarta

Tarigan, Henry Guntur. 1991. *Prinsip-Prinsip Dasar Sastra*, Angkasa Bandung

Taher, Elza Peldi. 1994. *Demokrasi Politik, Budaya dan Ekonomi*, Pengalaman Indonesia  
Masa Orde Baru, Yayasan Wakaf Paramadina

Teguh Budi Harjanto, Nicolaus. 1998. *Memajukan Demokrasi Mencegah Disintegrasi Sebuah Wacana Pembangunan Politik*, PT Tiara Wacana Yogyakarta

Uhlin, Andreas. 1998. *Oposisi Berserak, Arus Deras Demokratisasi Gelombang Ke Tiga di Indonesia*, Mizan, Bandung

### **Sumber Website dan Jurnal.**

Sejarah Kebudayaan Lampung, Drs. Iskandar Syah. FKIP Universitas Lampung

*Gerbang, Jurnal Pemikiran Agama dan Demokrasi*. Vol 07. No.03. Mei-Juli 2000.

<http://blog.unila.ac.id/abdulsyani/> (diakses tanggal 20 Februari 2016, Pukul 19:42 WIB)

[http:// www. Dte.gn.apc.org](http://www.Dte.gn.apc.org) (diakses tanggal 19 Februari 2016, Pukul 19:42 WIB)

[http:// www. Ireyogya.com](http://www.Ireyogya.com) (diakses tanggal 21 Februari 2016, Pukul 19:42 WIB)

<http://news.detik.com> (diakses tanggal 20 Februari 2016, Pukul 19:42 WIB)